

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**



**DINAMIKA MASYARAKAT DI PERBATASAN NEGARA INDONESIA-TIMOR
LESTE: STRATEGI ADAPTASI BUDAYA MASYARAKAT ADAT DI
PERBATASAN NUSA TENGGARA TI MUR TIMOR LESTE TERHADAP
MODERNISASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
DI PERBATASAN NEGARA**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

ENI SUGIARTI, S.S.,M. HUM.

0013117003

DRS. MURYADI, M.I.P.

0018026405

SHINTA DEVI IKA SHANTI RAHAYUS.S.M.A.

0011097704

**DIBIYAI OLEH
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDRAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

KKB
kk-2
LP 70/19
Sug
d

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**DINAMIKA MASYARAKAT DI PERBATASAN NEGARA INDONESIA-TIMOR
LESTE: STRATEGI ADAPTASI BUDAYA MASYARAKAT ADAT DI
PERBATASAN NUSA TENGGARA TI MUR TIMOR LESTE TERHADAP
MODERNISASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
DI PERBATASAN NEGARA**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

ENI SUGIARTI, S.S.,M. HUM.	0013117003
DRS. MURYADI, M.I.P.	0018026405
SHINTA DEVI IKA SHANTI RAHAYUS.S.M.A.	0011097704

**DIBIYAI OLEH
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDRAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Dinamika Masyarakat Di Perbatasan Negara Indonesia- Timor Leste : Strategi Adaptasi Budaya Masyarakat Adat di Perbatasan Nusa Tenggara Timur - Timor Leste terhadap MODernisasi Birokrasi dan Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan Negara

Peneliti/Pelaksana
 Nama Lengkap : ENI SUGIARTI, S.S., M.Hum
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 NIDN : 0013117003
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Program Studi : Ilmu Sejarah
 Nomor HP : 085233489032
 Alamat surel (e-mail) : danu_damar@yahoo.co.id

Anggota (1)
 Nama Lengkap : SHINTA DEVI IKA SANTHI RAHAYU S.S., M.A.
 NIDN : 0011097704
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota (2)
 Nama Lengkap : Drs MURYADI M.I.P
 NIDN : 0018026405
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)
 Nama Institusi Mitra : -
 Alamat : -
 Penanggung Jawab : -
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
 Biaya Tahun Berjalan : Rp 105,026,250
 Biaya Keseluruhan : Rp 315,026,250



Mengetahui,
 Dekan FIB

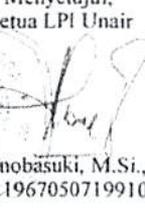
(Diah Ariani Arimbi, S.S., M.A., Ph.D.)
 NIP/NIK 197004051994042003

Kota Surabaya, 12 - 11 - 2018
 Ketua.



(ENI SUGIARTI, S.S., M.Hum)
 NIP/NIK 197011131998022001

Menyetujui,
 Ketua LPI Unair

(Herry Purnobasuki, M.Si., Ph.D.)
 NIP/NIK 196705071991021001



RINGKASAN

Kedinamikaan yang terjadi di wilayah perbatasan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Upaya pemerintah merubah paradigma tentang wilayah perbatasan dengan melakukan pendekatan *prosperity* dengan melakukan pembenahan tata kelola di wilayah perbatasan dan percepatan pembangunan serta pemerataan di wilayah perbatasan Timur Indonesia berhadapan dengan beberapa kendala. Salah satunya adalah kesiapan masyarakat menerima perubahan dan juga kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Masyarakat di wilayah perbatasan NTT-Timor Leste adalah masyarakat adat yang disatukan dengan tradisi yang kuat serta mempunyai ikatan emosional yang kuat sebagai satu kesatuan masyarakat adat.

Penelitian tentang dinamika perbatasan difokuskan pada strategi adaptasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur Indonesia –Timor Leste terhadap modernisasi birokrasi dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang modern sebagai perwujudan program Nawacita pemerintah. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana proses adaptasi budaya masyarakat adat di kawasan perbatasan NTT – Timor Leste Bagaimana bentuk adaptasi budaya dari masyarakat adat untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada serta factor-faktor pendukung dan penghambat adaptasi budaya masyarakat adat terhadap perubahan di lingkungan yang baru?

Penelitian ini mempunyai target yang akan dicapai yaitu mampu mengidentifikasi proses adaptasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat, mengidentifikasi terhadap bentuk strategi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat adat serta menjelaskan factor-faktor pendukung dan penghambat proses adaptasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut. Adapun tujuan jangka panjang adalah tercapainya pemerataan pembangunan dan penerapan tata kelola yang baik di wilayah perbatasan dengan melibatkan secara aktif masyarakat adat di wilayah perbatasan NTT Indonesia – dengan Timor Leste.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan dan Emik dengan melakukan observasi langsung dengan melakukan teknik *partisipant observation*. Untuk menguatkan perolehan data penelitian ini juga menggunakan teknik FGD dengan dinas- dinas terkait antara lain Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Imigrasi, TNI dan Kepolisian serta Bappeda dan juga tokoh –tokoh masyarakat adat. Data hasil observasi lapangan tersebut di cross cek dengan pendekatan etik. Pendekatan Etik dalam penelitian ini menggunakan teori- teori interaksi budaya dan teori adaptasi budaya. Perubahan lingkungan social budaya dan sistem yang ada dalam program modernisasi dan percepatan pembangunan di perbatasan mendorong kelompok-kelompok masyarakat adat untuk melakukan adaptasi dengan perubahan di lingkungan mereka. Dalam upaya melakukan adaptasi tersebut masyarakat adat mengembangkan strategi-strategi adaptasi antara nilai-nilai yang berkembang pada mereka dengan tuntutan modernisasi yang mengelilingi mereka. Berbagai faktor pendorong dan penghambat menyertai proses adaptasi tersebut. Dan akhirnya membentuk perubahan social budaya dalam diri masyarakat tradisi suku dawan dan suku Tetun.

Penelitian ini akan sejalan dengan renstra peneltian Perguruan Tinggi Unair dengan Bidang (613)Humaniora Tema Psikologi dan Budaya dengan Fokus kajian : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil). Penelitian ini juga menunjang Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan Negara.

Key word: Strategi adaptatif budaya, Masyarakat adati, Modernisasi, Perbatasan negara

KATA PENGANTAR

Wilayah Perbatasan Negara selalu menarik untuk dikaji. Kedinamisan yang terjadi di wilayah terdepan Negara menjadi cerminan wajah Negara. Hal tersebut tidak lepas bagaimana Negara hadir dan mengelola wilayah depan Negara dan bagaimana masyarakat adat dapat menjadi bagian dari proses yang terjadi. Kehadiran Negara menjadi sangat penting dengan kebijakan strategis dan masyarakat adat menjadi bagian yang harus dilibatkan dalam pelaksanaannya sehingga kedinamisan yang terjadi di wilayah mereka tidak menjadikan mereka tercerabut dari lingkungan mereka.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar sampai pada pembuatan laporan akhir. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini antara lain\;

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga
3. Badan Negara Pengelola Perbatasan di Kab. Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Dinas-Dinas Terkait: Dinas Bea Dan Cukai, Dinas Imigrasi, Dinas Karantina
5. Para Tetua Adat di Timor Tengah Utara dan di wilayah Belu
6. Warga masyarakat Adat di Belu, Motamasin, Insana Utara.

Peneliti sangat berharap penelitian dapat memberi manfaat untuk pemerintah, masyarakat adat dan para akademisi terutama yang berkepentingan dengan permasalahan yang ada di perbatasan Negara. Peneliti menyadari masih banyak hal yang harus ditambahkan untuk penyempurnaan dalam penelitian ini, maka dengan rendah hati peneliti mengharapkan kritis dan saran para pembaca.

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Urgensi Penelitian.....	5
BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2. Konsepsi Strategi adaptasi budaya.....	9
2.3. Konsepsi Modernisasi.....	11
2.3. Konsepsi tentang Masyarakat Adat.....	11
BAB.III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	12
3.1. Tujuan Penelitian.....	13
3.2. Manfaat Penelitian.....	13
BAB.IV. METODE PENELITIAN.....	16
4.1. Wilayah Penelitian.....	16
4.2. Prosedur Penelitian.....	16
4.3. Pendekatan.....	18
4.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
4.5. Analisis data.....	21
4.6. Target / Indikator Keberhasilan.....	25
4.7. Riset Desain.....	27
BAB.V. HASIL DAN LUARAN YANG CAPAIAN.....	28
5.1. Arah Kebijakan Pemerintah di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.....	37
5.2. Pembangunan Kawasan Perbatasan Wini.....	40
5.3. Kawasan Perbatasan Montamasin.....	44
5.4. Membangun Peradaban di Batas Negara : Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia- Timor Leste.....	49
5.5.Mempercantik Wajah dan Strategi adaptasi Masyarakat Adat di Perbatasan Indonesia – Timor Leste.....	54
5.6.Modernisasi Birokrasi dan Pembangunan Sarana Dan Prasana Modern di Pintu Perbatasan Indonesia- Timor Leste.....	60

5.7. Partisipasi dan adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan dan

Pengelolaan Di Kawasan Perbatasan Indonesia- Timor Leste.....	68
BAB. VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	75
BAB. VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin dan Penduduk Miskin (Ribuan) di Kabupaten TTU, 20052012.....	31
Tabel 2: Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Perbatasan Negara Asing.....	50
Tabel 3. Jumlah Daya dan Pelanggan PLN di Kecamatan Kobalima kabupaten Malaka....	61
Tabel 4. Banyaknya Usaha Sektor Perdagangan menurut Jenis Usaha di Kecamatan Kobalima.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pintu Gerbang Masuk Perbatasan Timor Leste	31
Gambar 2: Pintu Gerbang Masuk Indonesia.....	31
Gambar 3: Pelayanan birokrasi yang modern di Pos Lintas Batas Negara.....	38
Gambar 4: Pegawai Imigrasi yang multi etnis.....	38
Gambar 5: Penggunaan mesin pendeteksi baik untuk barang maupun orang PLBN.....	41
Gambar 6: Bank yang menyelenggarakan money changer di kawasan perbatasan.....	44
Gambar 7: Pembangunan Jalan arteri yang tersedat.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kegiatan penelitian di Oecusse.....	56
Lampiran 2 Ketua adat di Insana.....	56
Lampiran 3 Pintu Masuk Perbatasan Motamasin.....	57
Lampiran 4 Ruang Pelayanan Karantina.....	57
Lampiran 5 : Pintu Masuk Perbatasan Wini.....	58
Lampiran 6 Listrikisasi di Daerah Motamasin.....	58

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Kawasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste merupakan kawasan perbatasan yang relatif masih baru. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya terjadi kedinamikaan dalam penyelenggaraan maupun kedinamikaan masyarakat di kawasan tersebut. Pintu perbatasan sebagai masuk dan keluar manusia dan barang sekaligus sebagai wilayah terluar Indonesia. Sebagai pintu keluar masuk barang dan manusia Pintu perbatasan memiliki fungsi mobilitas dengan berpedoman pada tata aturan standar internasional. Dengan mengacu pada standar internasional pos lintas batas Negara di wilayah perbatasan Indonesia- timor Leste belum sepenuhnya menerapkan aturan tersebut. Pertimbangan kesiapan birokrasi dan dan keteriaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan lintas batas Negara hingga tahun 2015.

Pemerintah Indonesia dalam upaya menata wilayah perbatasan berpedoman pada peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pengelolaan wilayah yang ada di perbatasan. Secara Filosofis menurut Mahendra problematik di kawasan perbatasan di Indonesia terletak pada landasan filosofis atau pandangan dasar cita-cita dan tujuan pendirian Negara Republik Indonesia. Problem Yuridis, permasalahan kawasan perbatasan tidak hanya penegasan garis batas Negara tetapi juga penempatan wilayah perbatasan sebagai bagian integral dari wilayah Negara yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang professional dengan berpijak

pada peraturan kebijakan nasional, namun harus memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara (*one regulation concept*) perubahan dari *hard border policy* menjadi *soft border policy*. (Agus Puji Prasetyo : 2016) Dalam Nawacita yang dicanang pemerintah dilakukan dalam strategi Pembangunan Nasional yang terbagi dalam tiga dimensi pembangunan salah satunya dimensi pemerataan dan kewilayahan yang menekankan pada pembangunan untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah dengan memperkecil kesenjangan antara kelompok pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah dengan prioritas (1) wilayah desa, (2) wilayah pinggiran , (3) Luar Jawa dan Kawasan Timur. Pelaksanaan program ini dalam pelaksanaan Program RPJM 2015 -2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016.

Dalam salah satu bagian dalam pidato kenegaraan Kebijakan pembangunan wilayah antara lain dengan keberpihakan terhadap Kawasan Timur Indonesia yang ditunjukkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi serta modernisasi di luar Jawa yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan di daerah tertinggal , perdesaan dan perbatasan untuk menghindari kesenjangan antar wilayah. (Pidato Kenegaraan Kerangka Kebijakan RPJM 2015-2016, hlm. 2- 9).

Dengan mendasarkan pada perubahan konsep tentang wilayah perbatasan tersebut pemerintah Indonesia melakukan pembangunan sarana dan prasarana dan upaya pemberdayaan masyarakat. Modernisasi di wilayah perbatasan disalah satu sisi memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan perekonomian, pengembangan kehidupan dan pembangunan masyarakat di segala bidang namun percepatan pembangunan ini berdampak pada kesiapan dari masyarakat di

perbatasan untuk masuk dalam proses modernisasi dan globalisasi.

Program pengembangan wilayah perbatasan Indonesia –Timor Leste, pemerintah Indonesia melaksanakan Program pengembangan sarana dan prasana infrastruktur serta penataan pengelolaan administrasi wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pengembangan Infrastruktur perbatasan dengan melaksanakan “Proyek Sabuk Merah Perbatasan dengan membuka akses ruas jalan sepanjang 177 Km. Pembukaan ruas jalan memberikan dampak keterbukaan akses yang lebih besar bagi mobilitas masyarakat keluar dan masuk wilayah Indonesia-Timor Leste. Selain pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana , pemerintah juga melakukan Program Pembenahan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dengan melakukan modernisasi Pengelolaan birokrasi Wilayah Perbatasan dengan system pelayanan satu atap serta mendasarkan pada aturan Perbatasan Lintas Negara.

Program- program yang dilaksanakan sejak tahun 2016 tersebut berdampak besar pada perubahan “Wajah Baru Wilayah Perbatasan “ dan masuknya masyarakat Perbatasan dalam birokrasi modern yang diterapkan di perbatasan membawa konsekuensi adanya proses adaptasi dari masyarakat terhadap birokrasi yang berbasis pada birokrasi modern. Permasalahan muncul ketika masyarakat tidak mempunyai kesiapan yang cukup untuk masuk dalam birokrasi dan proses percepatan pembangunan tersebut. Paling tidak ada dua hal penting yaitu masuknya birokrasi modern serta hadirnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi modern berdampak besar terhadap tuntutan adaptasi yang tinggi bagi masyarakat tradisi di perbatasan Indonesia -Timor Leste.

Masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste lahir dari kesatuan sosio-

kultural sebagai orang Timor . Pada saat terjadi disintegrasi politik dan terpisahkan secara politik tidak serta merta memisahkan ikatan ikatan sosial dan ikatan ikatan kultural lama mereka. Kesamaan akar sosial kultural membentuk pemahaman tersendiri tentang Garis Lintas Batas Negara. Garis Lintas Batas Negara dan penerapan birokrasi di perbatasan menjadi tidak efektif diterapkan sebatas formalitas yangseringkali terpinggirkan oleh ikatan ikatan social-kultural dari masyarakat di perbatasan kedua negara . Masyarakat tradisi menerapkan praktek-praktek kehidupan yang disesuaikan dengan tradisi-tradisi yang telah ada dan mempengaruhi terhadap operasional perbatasan bahkan seringkali aturan aturan hukum formal tentang wilayah perbatasan tidak berjalan dan dan memunculkan praktek-praktek birokrasi tradisional berdasarkan aturan aturan adat. Hal ini kemudian memunculkan adanya bentuk praktek praktek illegal di wilayah Perbatasan Indonesia- Timor Leste. Proses modernisasi dimana masyarakat belum mempunyai kecukupan untuk masuk dalam birokrasi modern. Proses adaptasi terhadap birokrasi modern serta percepatan yang ada berjalan lambat dan bahkan menimbulkan konflik social pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dengan latarbelakang masyarakat yang masih terbelakang.

Percepatan pembangunan sarana prasana perbatasan dan penggunaan teknologi modern di tengah tengah masyarakat tradisi serta masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat kehidupan rendah di Perbatasan Nusa TenggaraTimur _ Timor Leste menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Upaya pemerintah melakukan perubahan besar dengan membangun sarana dan

prasarana yang berbasis pada teknologi modern berdampak besar pada tidak maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana tersebut serta kebermanfaatan terhadap masyarakat serta menuntut masyarakat tradisi untuk melakukan adaptasi yang tinggi terhadap kehadirannya.

Ketimpangan terdapat proses modernisasi pada tahap tertentu dapat menimbulkan adanya *cultural lag* dan berpotensi menimbulkan *konflik sosial* pada masyarakat. Kondisi ini akan dapat menjadi permasalahan dan memerlukan penanganan yang serius dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemilihan strategi adaptasi yang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dan juga capaian yang ada. Kemampuan pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan strategi adaptif sehingga kesenjangan yang ada dapat terjembatani dan target percepatan dan modernisasi dapat tercapai.

1.2. Rumusan Penelitian

Proses modernisasi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste mengalami beberapa kendala terutama yang pada masyarakat di perbatasan. Kemampuan adaptasi dengan percepatan pembangunan dan birokrasi modern menuntut kemampuan untuk memilih dan mengembangkan strategi adaptif yang sesuai dengan realitas masyarakat yang ada.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut dalam penelitian ini menfokuskan pertanyaan:

1.3. Bentuk Pengembangan dan modernisasi apa saja yang dilakukan pemerintah di wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste ?

1.4. Bagaimana Strategi Adaptasi Budaya yang dilakukan oleh Masyarakat di Perbatasan Indonesia Timor Leste terhadap percepatan pembangunan dan modernisasi birokrasi?

1.5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyertai adaptasi masyarakat terhadap proses percepatan pembangunan dan modernisasi birokrasi di perbatasan Indonesia-Timor Leste?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Kawasan perbatasan Indonesia- Timor Leste dan kedinamikaan sangat menarik untuk dikaji. Munculnya permasalahan-permasalahan di sekitar kawasan perbatasan terjadi oleh beberapa faktor yaitu factor internal dari masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang masih terikat oleh ikatan-ikatan social sebagai satu akar social dan budaya yang sama sebagai sesama suku. (Eni Sugiarti,2014). Selain itu sumber daya manusia di wilayah perbatasan memiliki tingkat kehdupan yang rendah sebagai dampak dari adanya keterbatasan kehidupan di wilayah terluar dari sebuah Negara menjadikan pengembangan tingkat kehidupan menjadi lamban (Badan Pengelola Perbatasan Daerah, 2015)

Faktor eksternal lambannya pengembangan pembangunan di wilayah perbatasan yaitu tidak adanya koordinasi yang baik dalam birokrasi antar institusi-institusi terkait dan tumpang tindihnya kewenangan dari institusi-institusi yang menangani permasalahan perbatasan (BPPD,2015). Tidak adanya koordinasi dari institusi –institusi yang menangani masalah perbatasan di perparah dengan minimnya saran dan prasarana dikawasan perbatasan yang berakibat sulitnya akses mobilitas manusia dan barang dan menjadikan perkembangan di perbatasan menjadi lambat (Eni Sugiarti, 2016).

Perubahan yang besar terjadi pada saat tahun 2016 dimulai modernisasi birokrasi dan proses percepatn pembangunan fisik di kawasan perbatasan Indonesia

Timur dalam program Nawacita. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan Negara sehingga kajian-kajian tentang *border area* dengan pendekatan *prosperity approach* perlu mendapat perhatian yang besar agar dapat memahamidan menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan perbatasan secara modern dan terpadu ditujukan untuk memudahkan akses mobilitas manusia dan barang di kawasan perbatasan. Selain itu modernisasi birokrasi pelayanan yang terkordinasi dan terpadu di kawasan perbatasan juga menjadi tujuan dari program modeernisasi kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste (RPJM Kawasan Perbatasan , 2016).

Perubahan yang besar di kawasan terdepan Negara Indonesia – Timor Leste berdampak luas terhadap munculnya kedinamikaan baru di Kawasan tersebut. Masyarakat sebagai bagaan integral di kawasan perbatasan sebagai kelompok social yang paling besar terkena dampak perubahan tersebut akibat modernisasi dan percepatan pembangunan. Masyarakat mau tidak mau masuk dalam arus perubahan yang tengah terjadi di kawasan perbatasan. Kesiapan masyarakat menghadapi perubahan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian mengingat masyarakat dikawasan perbatasan Indonesia Timor Leste adalah masyarakat adat yang sangat kuat dengan nilai-nilai tradisi. Dalam masyarakat tradisi aktifitas kehidupan terpusatkan pada nilai nilai adat

2.2. Konsepsi Penelitian

2.2.1. Konsepsi Strategi adaptasi budaya.

Strategi adalah pilihan terbaik atau yang paling menuntungkan, baik berupa sikap, ide, juga berbagai sarana fisik material, dimensi waktu dan ruang dan lain lain. Semua hal tersebut diarahkan untuk mencapai suatu hasil yang semaksimal mungkin dari suatu saha atau kegiatan (Sobirin, 2010). **Strategi adalah cara atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.** Dasar pendefinisian ini untuk menganalisis tentang bagaimana atau cara cara yang dilakukan oleh masyarakat tradisi dari suku Tetun maupun suku Dawan cara mereka merespon terhadap masuknya pengaruh baru dalam mensikapi adanya perubahan besar dalam tatanan budaya ketika ada budaya baru yang masuk dalam kehidupan mereka. Budaya baru yang mendorong munculnya respon respon ini oleh Kim katagorikan dalam proses komunikasi budaya. Pada tahap ini terjadi adanya interaksi budaya masyarakat setempat dari suku Dawan dengan moderinisasi yang terjadi di Perbatasan. Dan pada saat itulah masyarakat adat dapat mengkatagorikan fenomena budaya yang baru bagi mereka dan memilah- milah jenis perubahan budaya tersebut.

Adaptasi menurut Haviland sebagai proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organism pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organsme. Penyesuaian dua arah seperti ini perlu agar semua bentuk kehidupan dapat bertahan hidup termasuk manusia (Haviland 1993: 3).

Adaptasi budaya menurut Kim merupakan proses dasar komunikasi yaitu menyampaikan pesan , medium dan penerima pesan, sehingga terjadi encoding dan decoding. Proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru proses pengiriman pesan penduduk local dilingkungan baru tersebut

yang dapat dipahami oleh individu pendatang disebut enculturation (Lusia Savitri Setyo Utami Teori-Teori Adaptasi antar Budaya dalam..jurnal Komunikasi Universitas trauma Negara Vol 7 no. 2 Juli 2015).

Julian H Steward (dalam Haviland, 1993:3) adaptasi budaya mengacu pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisme pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pad organism. Penyesuaian dua arah terjadi sehingga membentuk kebertahanan kehidupan.

Adaptasi sangat berkaitan dengan ekologi budaya. Salah satu ciri ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran yaitu cara system budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya. Proses adaptasi budaya tidak dapat dilepasakn dari ekologi budaya yang bercirikan perhatian adaptasi pada tataran : pertama cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan total dan ekdua sebagai konsekuensi sistematik bagaiman institusi beradaptasi dan saling menyesuaikan diri Steward menjelaskan terdapat 3 prosedur adaptasi ekologi budaya yaitu (1) hubungan antara teknologi dengan lingkungan budaya sejauhmana teknologi ekfektivitasnya mampu daya. (2) Pola tata kelakuan yang berhubungan dengan teknologi bagaiman anggota-anggota dalam masyarakat budaya agar dapat bertahan. (3) hubungan polapola tata kelakuan dengan unsure lain dalam sistem

budaya yang baru (Kaplan,2002: 102). Kemampuan dari masyarakat adat untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru tidak hanya berangkat dari dalam masyarakat adat itu tetapi juga ada indikator dari luar dalam hal ini pemerintah daerah untuk secara aktif mendorong masyarakat adat untuk beradaptasi. Pemerintah juga harus aktif untuk dapat menerapkan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat adat.

2.2.2. Konsepsi Modernisasi

Modernisasi menurut pengertian relative, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis bercirikan lebih khusus daripada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra-modern (Sztompka, Piort, Sosiologi Perubahan Sosial, (Prenada, Jakarta, 2004.: 152-153.)

2.2.3 Konsepsi tentang Masyarakat Adat

Menurut Parsudi Suparlan yang dikutip Anan Mutakin (200:1) , masyarakat adat adalah suatu kesatuan kehidupan sosial manusia, menempati wilayah tertentu dengan keteraturan dalam kehidupan social tersebut telah dimungkinkan adanya seperangkat pranata social yang menjadi kebiasaan dalam kebudayaan yang mereka miliki bersama.

Masyarakat tradisional dapat diartikan sebagai masyarakat yang hidup dengan berpegang teguh pada tradisi-tradisi tertentu yang sudah ada sebelumnya. Masyarakat adat Masih memegang adat yang mereka miliki sebagai aturan baku

dalam kehidupan dan dijadikan sebagai konsep dalam bertingkah laku di dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap masyarakat adat terdapat dalam Undang-undang nomor 27 th 2007 dan Undang-undang no 32 th 2009 yang mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum. (Kertas Kerja : 2017).

Masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional atau the indigenous people sering disebut dengan masyarakat adat(Samosir 2013 :69). Masyarakat adat timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara masyarakat dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan sepenuhnya dimanfaatkan oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat dibagi menjadi dua berdasarkan susunannya (Soerjono Soekanto,2010: 95) yaitu pertalian geneologis dan masyarakat adat berdasarkan lingkungan daerah Teritorial yaitu masyarakat adat yang tetap dan teratur, dengan anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Dan Sasaran

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Menganalisis bentuk bentuk pengembangan dan modernisasi yang terjadi di perbatasan Indonesia –Timor Leste
2. Menganalisis strategi-strategi adaptif yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan terhadap proses modrnisasi yang terjadi di wilayah perbatasan
3. Menganalisis factor-faktor pendukung dan penghambat yang menyertai proses adaptif yang dilakukan oleh masyarakat di perbatasan Indonesia – Timor Leste

B. Manfaat (Keutamaan)Penelitian

1. Tema tentang wilayah perbatasan dan kedinamikaan masyarkat di wilayah perbatasan merupakan tema yang menarik untuk dikaji. Perubahan pemerintah menempatkan wilayah perbatasan yang semula dianggap ewajah terluar yang identik dengan keterbelakangan berubah dengan adanya paradigm baru dalam menempatkan wilayah perbatasan sebagai wajah terdepan Negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya skala prioritas yang utama daripemerintah dari tingkt pusat sampai tingkat desa. upaya yang dilakukan untuk memoles wajah terdepan Negara dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan . Disamping itu juga diadakan modernisasi birokrasi

yang tidak hanya membawa dampak perubahan yang positif tetapi juga diringan dengan ketidaksiapan masyarakat untuk masuk dalam perubahan tersebut sehingga terjadinya *cultural shock*.

2. Daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan wilayah yang relatif masih baru yang memerlukan perhatian serius dari kedua belah negara. Perbatasan Indonesia –Timor Leste menjadi sangat kabur bahkan seakan-akan tidak ada ketika wilayah perbatasan dipahami dan dimaknai secara sosial-budaya. Permasalahan-permasalahan daerah perbatasan harus dipahami dengan dua pendekatan yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) maupun dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dengan adanya kemajuan dan kondisi yang relatif stabil pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian diperlukan adanya pemahaman baru tentang wilayah perbatasan dan dapat dilakukan melalui kajian-kajian dari berbagai bidang.
3. Masyarakat di Perbatasan Indonesia –Timor Leste merupakan masyarakat adat dan masih memegang erat nilai-nilai tradisi mereka . Pada saat masyarakat masuk dalam tatanan nilai yang baru dan modern maka terjadi adanya proses adaptasi nilai-nilai baru tersebut. Proses adaptasi ini menimbulkan ketimpangan dan memerlukan kepekaan dari pemerintah untuk menerapkan strategi-strategi yang tepat dalam upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses modernisasi di perbatasan Negara.

4. Adaptasi terhadap tatanan nilai baru akan melibatkan masyarakat tradisi sebagai subjek utama dalam pelaksanaannya. Dengan demikian masyarakat tradisi secara aktif melakukan penyesuaian-penyesuaian dan melakukan strategi-strategi adaptif yang tepat sehingga meminimalkan konflik-konflik social-kultural yang timbul.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian akan difokuskan di dua wilayah perbatasan Montain Kabupaten Belu dan wilayah Wini Kabupaten Timur tengah Utara. Dikedua wilayah perbatasan tersebut wilayah yang memiliki peran yang sangat strategis sebagai kawasan perbatasan, baik secara ketahanan keamanan (*belt of security*), ekonomi sebagai *gate way* atau lalu lintas perekonomian, maupun sebagai *image nasional*(citra nasional) dan *buffer zone* (daerah penyangga).

Kedua wilayah ini meruapakn pintu masuk Gate way dan terdapat Pos Lintas batas Negara dengan menerapkan modernisasi birokrasi dan juga menjadi perbatsasn yang dibangun scara modern.

Di wilayah Montain terdapat kelompok masyarakat adat suku Tetun , sedangkan di wilayah perbatasan Wini terdapat masyarakat adat suku Dawan sebagai suku dominan.

4.2. Prosedur Penelitian

Seusainya disetujui, **tahap pertama** yang akan dilakukan Tim Peneliti adalah akan merevisi proposal, terutama mengenai instrumen penelitian sampai menjadi operasional dan layak digunakan untuk riset. Pada tahap ini dibarengi dengan terjun observasi di lapangan yakni di lokasi penelitian Montain yang berbatasan dengan Dili Timor Lestedan Wilayah Wini yang berbatsasn dengan

distric Oecusse, Timor Leste untuk mencari bahan masukan bagi perbaikan operasional konsep dan instrument penelitian.

Tahap kedua, yakni tahap pengumpulan data yang dilakukan/berlangsung pada bulan kedua hingga bulan keenam (bulan Mei, Juni, Juli 2017). Semua anggota Tim terlibat dalam tahap ini, dua orang bersama para Pembantu Peneliti ke tempat lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini sekaligus melakukan analisis. Pengumpulan data juga dengan melakukan FGD (Focus Group Discusse) dengan perwakilan adat dan pemerintah yang terwakili dari institusi –institusi Badan Pengelola Perbatasan Daerah serta Dinas-dinas terikat di perbatasan.

Pada tahap pengumpulan data, indikator capaian adalah dapat mengidentifikasi informan yang akan dijadikan sebagai narasumber untuk wawancara dengan pengklasifikasian sesuai dengan kelompok-kelompok yang berkonflik, keterlibatan informan dalam konflik, dan lokasi riset, dengan demikian akan diperoleh data-data kasar.

Tahap ketiga, yakni analisis data (reduksi, penyajian, dan verifikasi) yang berlangsung pada bulan keenam sampai delapan (Agustus dan September 2017). Analisis dilakukan tim peneliti dengan menggunakan **Teori akulturasi dari Berry, Teori cultural Sock dari Oberg serta teori Culutal Adaptation dari Kim** . Selain analisis secara *desk* analisis tahap analisis juga melibatkan para ahli untuk mendapatkan masukan sekaligus reviewer dan pembacaan hasil penelitian.Tahap analisis indikator

capaiannya adalah draft penelitian yang merupakan hasil penelitian yang akan dievaluasi kembali setelah diadakan evaluasi dan monitoring.

Tahap keempat yakni pembuatan laporan, yang dilakukan pada bulan kesembilan (Oktober 2018).

Tahap kelima yaitu presentasi (biladiperlukan) dilakukan pada bulan kesepuluh (November 2018) atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tahapterakhir pelaporan indikator capaiannya adalah hasil akhir dari penelitian yang berupa laporan akhir hasil penelitian.

4.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian budaya tentang bagaimana suatu masyarakat tradisi menyikapi dan merespon serta mengembangkan strategi strategi budaya untuk beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Menurut Kaplan dan Maner dalam penelitian budaya dapat menggunakan pendekatan Emik dan Etik (Kaplan : 2002)

Dalam penelitian ini akan menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan Emik dengan melakukan pengkatagorian fenomena budaya dengan berdasarkan masyarakat setempat. **Pendekatan Emik** dalam penelitian ini akan menghasilkan data lapangan yang didasarkan pada temuan temua langsung di lapangan menurut pandangan masyarkat setempat. Hal ini diperlukan untuk memahami bagaimana masyarakat memahami perubahan budaya di sekelilingnya dengan cara pandang mereka apa adanya tanpa rekayasa teori maupun intervensi

peneliti. Data tersebut di jadikan sebagai dasar pengkatagorian tentang perubahan yang diraskan oleh masyarakat dengan adanya program modernisasi dan percepatan pembangunan di perbatasan Indonesia –Timor Leste.

Selain pendekatan Emik penelitian ini juga menggunakan pendekatan **Etik**, pendekatan ini dilakukan dalam penelitian dengan melakukan pengkatagorian fenomena budaya menurut peneliti dengan mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan perubahan budaya dan adaptasi budaya. Dalam penenlitian ini akan digunakan tiga teori besar yaitu **Teori Akulturasi Budaya** dari **Berry** dan **Teori Cultural Shock** dari **Oberg** serta **Teori Adaptasi Budaya** dari **Kim**.

Untuk menganalisis dengan mendekatkan pada pola pemenuhan kebutuhan hidup yang didorong oleh penggunaan sarana-sarana tradisional *Tradition action*¹ pola-pola tradisional, kebiasaan-kebiasaaan lama yang telah berakar dalam diri kedua masyarakat Wini dan Oesilo. (Ritzer, 1999)

4.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, pengamatan terlibat *participant Observation* (Jurgensen,1989). Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengamatan/observasi, partisipasi terlibat, dan wawancara mendalam (*in depth*) terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara bebas terhadap informan. Dalam hal ini peneliti melakukan empati dan mencoba masuk ke dalam alam pikiran informan atau menjadi *being native* (seakan-akan sepaham dengansang informan). Hal itu dilakukan oleh Peneliti semata-mata untuk

memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan akurat.

Dengan demikian dalam teknik pengumpulan data harus berdasarkan pada dasar pemikiran bahwa konstruksi social sebagai hasil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat serta proses-proses yang membuat setiap pengetahuan sebagai kenyataan. Dalam hal ini peneliliti akan menggunakan pendekatan Emik untuk mendapatkan data-data tentang pengetahuan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Pencarian sumber dalam bentuk ethnographic interviewing dengan menggunakan pendekatan Emik dengan cara membuat , merekonstruksi , melakukan wawancara , membuat transkrip, menganalisis, memeriksa dan melaporkan. Tokoh yang diwawancari meliputi (1)

tokoh adat sebagai pemangku adat dan dalam masyarakat adat Suku Dawan dan suku Tetun sebagai sumber tatanan nilai yang ada dan menjadi rujukan dalam aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat tentang mobilitas sosial. (2) Informan terdiri dari masyarakat di kedua suku tersebut yang bermukim di wilayah perbatasan Montain Timor Leste dan masyarakat yang bermukim di perbatasan Wini –Timor Leste.

Tenik wawancara alam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dari Scale (Scale, 1999), yang meliputi ada tiga langkah kerja yaitu:

1. Mendengarkan cerita, teknik ini memberikan ruang pada informan untuk menceritakan pengalaman mereka sebagai pelaku yang berarada dalam tatanan sosil masyarakat adat
2. Memperhatikan tingkah laku (*observing behavior*). Pengamatan terlibat

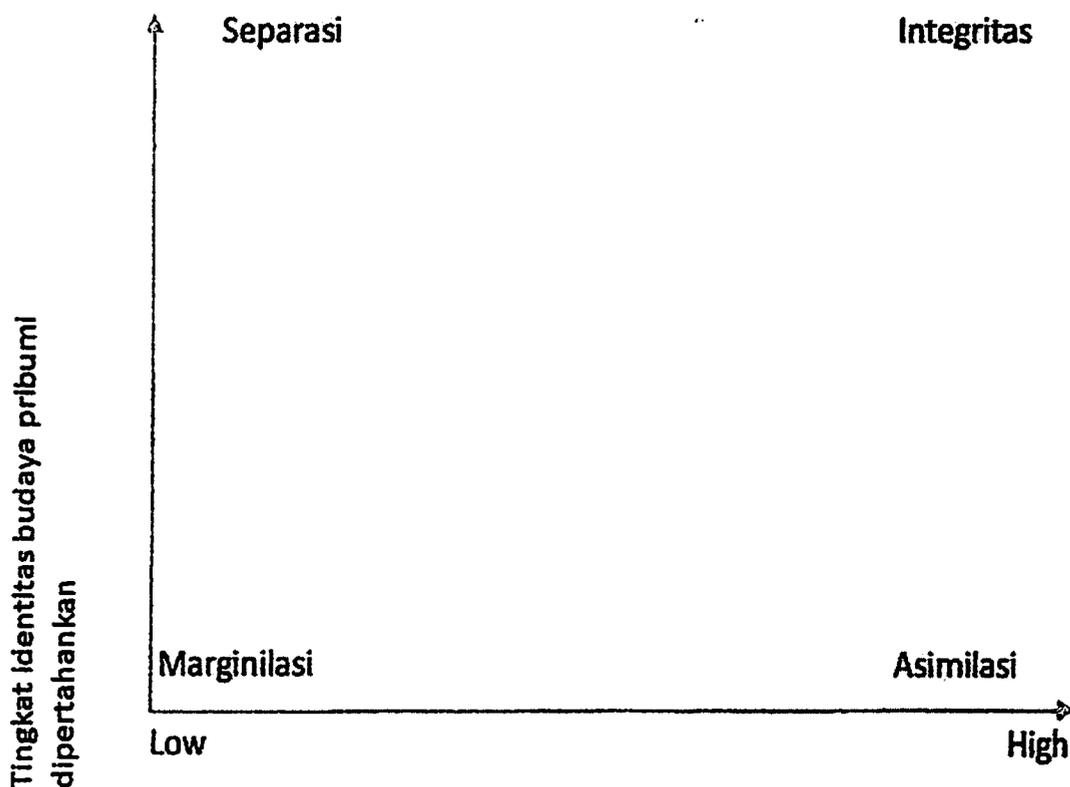
memberikan informasi non oral yang dapat menguatkan terhadap testimoni dari para informan sebagai bahan cross-cek dan sebagai bahan data sikap dan tingkah laku.

- a. Menguji jejak historis objek penelitian

4.5. Analisis Data

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, pengamatan terlibat (*participant observation*)² dan wawancara mendalam (*in depth*). Analisis data dengan menggunakan metode interpretatif, tepatnya metode *cultural domain analysis*³ yakni memahami aspek *meaning* ataupun *value* dalam budaya suatu masyarakat.

Berry menggambarkan tingkat level akulturasi



Tingkat kontak budaya baru dengan kelompok budaya mikro-budaya

Teori akulturasi Berry dan Teori *culture shock* dari Oberg menjelaskan bahwa terjadinya akulturasi terjadi ketika budaya lama mengadopsi budaya baru mulai dari sikap dan kebiasaan-kebiasaan budaya baru dimana budaya lama masuk dalam budaya baru yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikologi.

Lebih lanjut Berry menjelaskan level akulturasi menjadi dua bagian, pertama, kelompok budaya lama berinteraksi dengan budaya baru (*out group contact and relation*), kedua, masing masing budaya mempertahankan atau melepaskan atribut budaya (*in group identity dan maintenance*)

Untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kesenjangan budaya (*cultural lag*) yang terjadi pada masyarakat tradisi suku Tetun dan suku Dawan dengan modernisasi birokrasi dan modernisasi sarana dan prasarana modern yang diterapkan di perbatasan Indonesia –Timor Leste dengan menggunakan Teori Akulturasi dan *Cultural Shock* Setelah didapatkan hasilnya maka akan dilanjutkan dengan analisis terhadap strategi-strategi adaptif .

Proses adaptasi budaya tidak dapat dilepasakn dari ekologi budaya (Kaplan, 2002) yang bercirikan perhatian adaptasi pada tataran : pertama cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan total dan ekdua sebagai konsekuensi sistematis bgaiman institusi beradaptasi dan saling menyesuaikan diri Steward menjelaskan terdapat 3 prosedur adaptasi ekologi budaya yaitu hubungan antara teknologi dengan lingkungan budaya sejauhmana teknologi efektivitasnya mampu daya. (2) Pola tata kelakuan yang berhubungan dengan teknologi bagaimana anggota-anggota dalam masyarakat budaya agar dapat bertahan. (3) hubungan polapola tata kelakuan dengan unsure lain dalam sistem budaya yang baru.

Perilaku budaya dalam bentuk tindakan sosial menurut Marx Weber (Ritzer, 1992) dibedakan dalam 4 pola tindakan:

1. *Werk rational* yaitu pola pola tindakan seseorang yang didasari oleh rational.
2. *Werkrational action* yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar apa yang anggap baik,
3. *Affectionaction* yaitu tindakan yang dibuat-buat.

Traditional Action yaitu tindakan-tindakan yang didasari oleh kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu, sebagai tindakan merupakan rangsangan secara otomatis terhadap rangsangan di luar.

Analisis strategi adaptif dalam penelitian ini akan di bagi dalam dua katagori yang sekaligus menjadi dua tahap besar penelitian multiyears yaitu strategi adaptif budaya dari masyarakat tradisi dalam hal ini suku Tetun dan Suku dawan, serta strategi adaptif budaya yang di lakukan oleh pemerintah (yang nantinya akan mendi fokus penelitian tahun ke dua).

Analisis *Strategi adaptif budaya* dalam penelitian menggunakan Teori Strategi Adaptif Budaya dari Kim (Kim,2001: 153). Menurut Kim terdapat 2 tahap adaptasi yaitu *cultural adaptation* dan *cross cultural adaptation*. *Cultural adaptation* merupakan proses dasar komunikasi yaitu menyampaikan pesan , medium dan penerima pesan, sehingga terjadi encoding dan decoding. Proses ini idefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika invidu pindah ke lingkungan yang baru proses pengiriman pesan penduduk local dilingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh invidu pendapatang disebut *enculturation*.

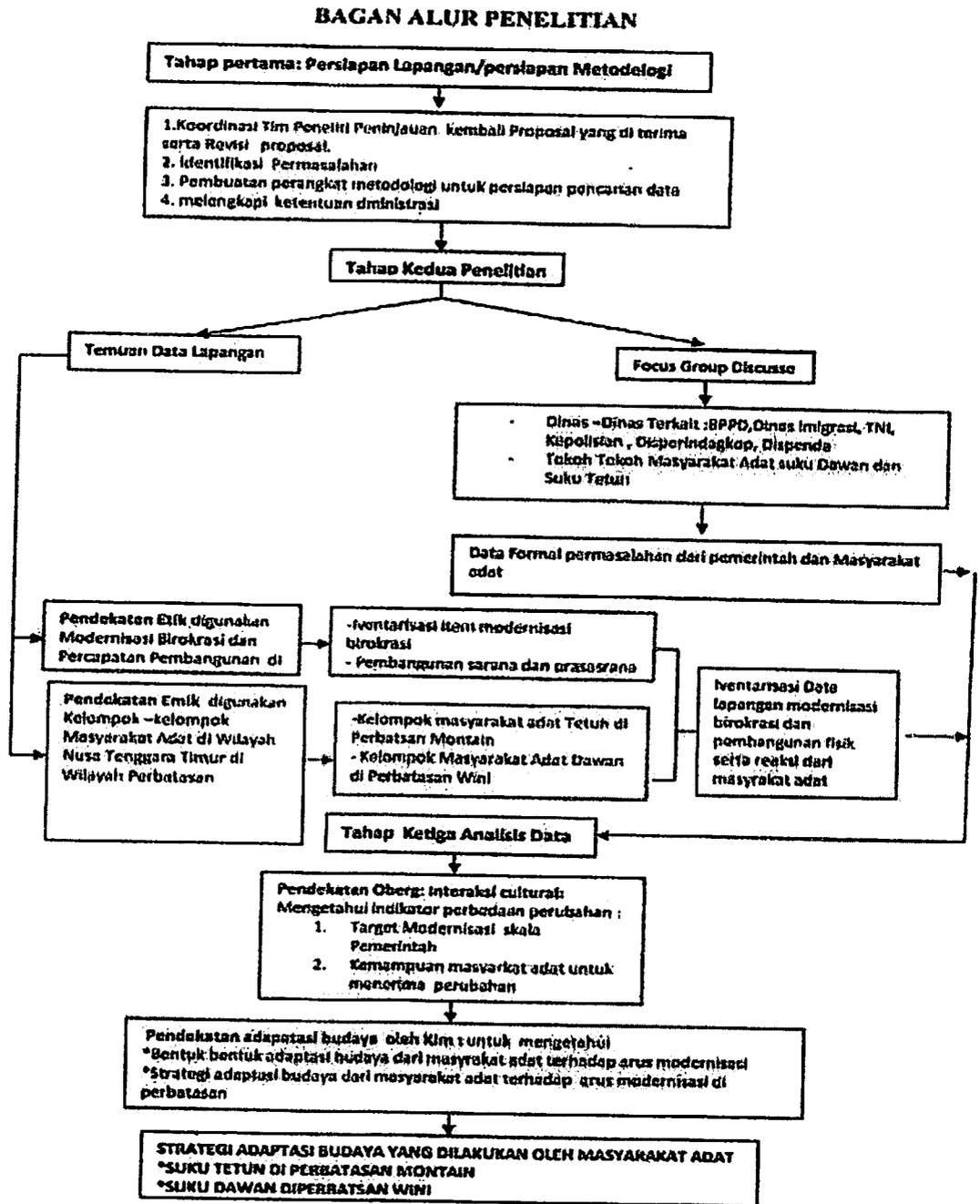
4.6. Indikator Capaian Tahunan

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun dengan target capaian sebagai berikut:

KEGIATAN TAHUN PERTAMA PENELITIAN: Dinamika Masyarakat Di Perbatasan Negara Indonesia- Timor Leste :Strategi: Adaptasi Budaya Masyarakat Adat di Perbatasan Nusa Tenggara Timur - Timor Leste terhadap MModernisasi Birokrasi dan Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan Negara	
TARGET	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi bentuk bentuk perubahan dalam bentuk modernisasi birokrasi dan modernisasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang di wilayah perbatasan. 2. Teridentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dari birokrasi modern dan modernisasi sarana prasarana penunjang di wilayah perbatasan. 3. Teridentifikasi kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat adat suku Dawan dan suku Tetun dalam mobilitas lintas batas Negara dan praktek praktek illegal di wilayah perbatasan Motain dan Wini.
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin dengan cara pengamatan langsung, wawancara dan juga referensi tertulis di wilayah perbatasan Wini dan Motain. 2. Melakukan pengumpulan data dengan melakukan FGD dengan pihak dinas terkait BPPD, TNI, Kepolisian, Imigrasi untuk mendapatkan data tentang permasalahan- permasalahan birokrasi di perbatasan 3. Melakukan FGD dengan masyarakat adat dari suku dawan dan suku Tetun untuk mendapatkan data tentang bagaimana masyarakat adat merespon terhadap persoalan-persoalan di wilayah perbatasan 4. Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dari pihak masyarakat adat dan pemerintah perbatasan dengan adanya modernisasi birokrasi dan modernisasi sarana dan prasarana di
JANGKA WAKTU	Satu Tahun Penelitian

<p>1. KEGIATAN TAHUN KEDUA PENELITIAN: Dinamika Masyarakat Di Perbatasan Negara Indonesia- Timor Leste :Strategi:Adaptasi Budaya Masyarakat Adat di Perbatasan Nusa Tenggara Timur - Timor Leste terhadap MODernisasi Birokrasi dan Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan Negara</p>	
<p>TARGET</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi birokrasi modern dan modernisasi sarana dan prasana yang menimbulkan ketimpangan pelaksanaan di tingkat masyarakat adat suku dawan dan sukuTetun di wilayah perbatasan Motain dan Wini. 2. Mengidentifikasi upaya maupun masyarakat adat suku Tetun dan Suku Dawan melakukan adaptasi terhadap perubahan di wilayah perbatasan. 3 Mengidentifikasikan bentuk bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat adat lingkungan yang baru.
<p>KEGIATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data sekomples mungkin terhadap bentuk bentuk perubahan baru yang menimbulkan <i>cultural lag</i> pada masyarakat adat 2. Melakukan FGD dengan teknik komprehensif antara pihak pemerintah dengan masyarakat adat untuk mendapatkan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di perbatasan 3. Mengidentifikasi upaya masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru.
<p>JANGKA WAKTU</p>	<p>Satu tahun penelitian</p>

4.7. Riset Desain





BAB V

PEMBAHASAN

Kawasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste merupakan kawasan perbatasan yang relatif masih baru. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya terjadi dinamika dalam penyelenggaraan maupun dinamika masyarakat di kawasan tersebut. Pintu perbatasan sebagai masuk dan keluar manusia dan barang sekaligus sebagai wilayah terluar Indonesia. Sebagai pintu keluar masuk barang dan manusia Pintu perbatasan memiliki fungsi mobilitas dengan berpedoman pada tata aturan standar internasional. Dengan mengacu pada standar internasional pos lintas batas Negara di wilayah perbatasan Indonesia- timor Leste belum sepenuhnya menerapkan aturan tersebut. Pertimbangan kesiapan birokrasi dan dan kriteria sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan lintas batas Negara hingga tahun 2015.

Penetapan kawasan strategis nasional yang termaksud dalam pasal 31 yaitu kawasan yang diprioritaskan untuk keamanan wilayah perbatasan antar daerah dan antar Negara. Pasal 33 kawasan strategis yang termasuk wilayah perbatasan antar Daerah dan antar Negara sebagaimana termasuk dalam pasal Pasal 34 ayat 4 meliputi 7 kecamatan . untuk keamanan Kawasan Perbatasan yang diprioritaskan pada daerah sepanjang garis batas antar Negara yang meliputi 7 wilayah kecamatan yaitu, Mutis, sepanjang garis batas antar negara yang meliputi wilayah 7 (tujuh) Kecamatan yaitu di Mutis, Miomaffo Barat, Musi, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu dan Insana Utara. Untuk teknis kondisi diuraikan dibawah ini :

1. Pengembangan Kawasan Buffer di wilayah sekitar perbatasan Distrik Oecussi, rencana pengembangan buffer dengan memberikan batasan wilayah dengan menggunakan tanaman tahunan sebagai buffer negara dengan lebar kawasan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penempatan Pos-pos perbatasan dan pengamanan kawasan disesuaikan dengan kondisi wilayah.
3. Peningkatan pengembangan kawasan perbatasan dilaksanakan melalui pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan secara proporsional dengan kondisi lokal.

Pemerintah Joko Widodo menerapkan konsep OBOR yang diadopsi dari China. Inti dari nawa Cita adalah membuka isolasi untuk menggerakkan dan memberi peluang menggerakkan produk Negara kepulauan. The Belt Road dari timur ke barat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga. pemerintah membangun symbol symbol Negara dengan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Montain, Motasmasin, Wini 9 NTT), Kalimantan Barat di Aruk, Naga Badau, dan Entikong, serta di wilayah Papuan di Skouw.

Konsepnya adalah membangun infrastruktur di perbatasan mulai PLBN sebagai bangunan utama, pos kendaraan pemeriksaan, bangunan pemeriksaan seperti kargo, bangunan utilitas (rumah pompa dan power house,) monument, gerbang kedatangan dan keberangkat an, sarana jalan pendukung, landscap. Dan jalur perindustrian atau zona inti. Selain itu zona pendukung yaitu area parker, a bangunan

kantor PLBN, mes pegawai, klinik, pasar tematik, food court, rest area, wisma Indonesia dan masjid.

Pengelolaan yang diberikan kepada daerah daerah untuk mengelola potens yang ada di wilayahnya memberikan keuntungan keuntungan bagi pengembangan daerah yang sesuai dengan pa yang mereka miliki. Demikian juga pengelolaan yang di berikan untuk wilayah perbatasan. Diberikannya otonomi bagi wilayah daerah berupa DOB (Daerah Otonomi baru) utnuk wilayah perbatasan memberikan hak mengelola pada pemda.

Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu merupakan pintu lalu lintas batas orang dan barang keluar masuk batas wilayah Negara . PLBN merupakan kawasan pelayanan yang menyelenggarakan fungsi keimigrasian, kepabeaan(Custom), Karantina (Quarantine), Keamanan (Secuarity) dan fungsi lainya yang diperlukan.

Pembangunan PLBN mempunyai tujuan (1)Pertahanan dan Keamanan dengan mengedepankan pada aspek keamanan sebagai garda terdepan pertahanan Negara serta keutuhan NKRI. Selain itu kawasan perbatasan juga sebagai tempat pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tinggal di kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan sebagai bagian dari entitas kerungan suatu Ncgara yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah yang harus dijaga dari segala ancaman yang dihadapinya. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi Negara untuk menjadikan seluruh wilayah khususnya wilayah perbatasan dalam pengelolaan dan pertahanan Negara. Konsepsipertahaman perbatasan sebagai totalitas dari keseluruhan keamanan Nasional dengan menggunakan power dan resources yang ada.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pengamanan dan ketahanan di wilayah perbatasan dilakukan secara permanen. Sebagai wilayah perbatasan yang baru kawasan perbatasan Indonesia –Timor Leste masih dijumpai konflik-konflik vertical maupun horizontal. meskipun intensitasnya sudah rendah. Permasalahan tentang permasalahan tanah ulayat masih sering dijumpai di wilayah –wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste. Dengan demikian untuk tetap menjaga kemungkinan adanya ancaman dari luar dan dapat berdampak pada integritas bangsa, maka pengelolaan dan pengamanan maka perlu menempatkan wilayah perbatasan sebagai kawasan sabuk keamanan Negara.

Tujuan yang ke2 adalah pengembangan kawasan perbatasan dalam pengembangan ekonomi. Wilayah perbatasan identitik dengan wilayah dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kondisi ini tidak terjadi hanya karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pengembangan potensi alam maupun manusianya. Sebagai contoh di kawasan Timur Tengah Utara

Tabel 2 Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin dan Penduduk Miskin (Ribuan) di Kabupaten TTU, 2005-2012

Tahun	Penduduk Miskin (000 orang)	Presentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2005	69,50	31,53	103 108	6,56	2,04
2006	68,00	32,65	116 706	7,10	2,29
2007	60,40	30,12	125 983	4,76	1,16
2008	55,20	27,74	153 615	9,02	3,35
2009	50,60	24,96	161 964	4,92	1,50
2010	52,30	22,72	196 395	4,28	1,24
2011	50,50	21,33	216 681	3,16	0,76

2012	51,20	21,56	239 062	2,30	0,38
------	-------	-------	---------	------	------

Sumber BPS Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2014.

Masyarakat Suku Dawan di wilayah perbatasan Timor Tengah Utara hidup dalam kondisi pada tingkat kehidupan yang rendah. Masyarakat sangat menggantungkan kehidupan dari sumber daya alam yang rendah pula. Dari data statistik tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai angka tinggi meskipun ada penurunan dari tahun ke tahun.

Kondisi ini kemudian direspon oleh pemerintah Daerah dan pemerintah pusat untuk menjadikan pengembangan ekonomi wilayah wilayah perbatasan. Kebijakan pemerintah Daerah Timor Tengah Utara untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di perbatasan Timor Tengah Utara – Timor Leste dterdapat dalam Strategi pengembangan kawasan Perbatasan yang meliputi :

1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga.
2. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) , keamanan (*security*) dan lingkungan (*environment*) secara serasi.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dikecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan
4. Meningkatkan perlindungan sumber daya ala hutan tropis (*tropical forest*) dan Kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara nproduktif bagi kesejahteraan masyarakat local.

5. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan dibidang social, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga.

Berkaitan dengan program pengembangan kawasan perbatasan terdapat Kebijakan Kawasan Perbatasan dengan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan melalui Perda nomor 2 Tahun 2012. Kebijakan ini dengan mempertimbangkan lokasi prioritas(LOKPRI)

1. LOKPRI 1 : Insana Utara, Bikomi Utara dan Bikomi Nilulat
2. LOKPRI 2 : Kota Kefamenanu
3. LOKPRI 3: Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Mutis, Kecamatan Musi, dan Kecamatan Neibenu.

Berdasarkan kebijakan dengan adanya LOKPRI, maka pengembangan di wilayah Kecamatan Neibenu sebagai lokasi prioritas ke-3. Lokasi Lokasiprioritas untuk kecamatan Neibenu terutama difokuskan di wilayah perbatasan Nelu- Leolbatan sebagai daerah dalam katagori aspek *unsurved* yang masih dalam proses penyelesaian dari kedua belah pihak Negara bertetangga. Selain itu wilayah perbatasan Nelu merupakan wilayah perbatasan yang masih belum terbangun baik secara keamanan maupun secara infratraktur yang mendukung sebagai daerah perbatasan dan pintu depan wilayah Negara. Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan dengan membuka isolasi wilayah dengan pmbutan jalan tanah dan menempatkan Pos Penjagaan Perbatasan beserta personilnya. (Eni Sugiarti , 2016: 38-39)

Lebih lanjut pemerintah daerah dan bekerjasama dengan BNPP Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemberdayaan kawasan ekonomi di perbatasan Wini . penetapan Wini sebagai wilayah Pintu Lintas Batas Negara sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus dalam program Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wini

Untuk menunjang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Wini

1. pemerintah membangun fasilitas publik di Wini seperti telah dibangun jalan raya dua jalur sejauh belasan kilometer;
2. pengembangan pelabuhan Wini dengan Bupati Belu untuk mendorong agar daerah perbatasan itu menjadi kawasan ekonomi khusus,
3. pembangunan sejumlah gudang-gudang penampung barang
4. rencana pembangunan bandar udara yang letaknya berada di perbatasan dua kabupaten Belu dan Wini yaitu di Kecamatan Biboki Anleu (TTU) dan Kakuluk Mesak (Belu) yang memiliki hamparan sejauh belasan kilometer.
5. Pembangunan pintu pas lintas batas
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Telkomsel
7. Diadakannya Festival Crossborder Atambua menjadi agenda wajib yang didatangi para wisatawan, khususnya masyarakat Timor Leste. mengenalkan Atambua sebagai salah satu bagian dari Indonesia dengan kekayaan alam serta budayanya yang indah nan eksotis. Sebagai bentuk Wisata Perbatasan .

Data dari BPS, wisman yang berkunjung ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas (PLB) periode Mei 2017 menargetkan wisatawan manca Negara sebanyak 17 juta Wisman. Di crosborder. (BPS Kab. Malaka tahun 2017)

Penyelenggaraan pengelolaan kawasan perbatasan baik dengan tujuan keamanan maupun pengembangan ekonomi khusus tidak akan dapat maksimal apabila tidak ditunjang dengan pemberlakuan administrasi tata kelola yang baik. disamping itu juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk fasilitas fasilitas yang akan menunjang penyelenggaraan perlintasan Negara.

Berpijak dari itu pemerintah kemudian mulai tahun 2014 melakukan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasara modern di kawasan perbatasan. Sampai tahun 2014 dilakukan pemebangunan dengan tahapan –tahapan pembangunan fisik di kawasan perbasan. Wilayah perbatasan berubah menjadi kawasan baru yang modern dengan didukung oleh sarana dan prasana yang modern dan berbasisi teknologi.

Kawasan perbatasan di bangun menyerupai pembangunan kota baru di wilayah perbatasan Negara. Munculnya kota-kota baru di kawasan perbatasan tentunya harus diimbangi dengan kemampuan –kemampuan dari penduduk di sekitar kawasan untuk bertransformasi menjadi bagian dalam perubahan tersebut. Namun proses tersebut tidaklah mudah terutama untuk masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat adat.

Pembangunan Zona inti di PLBN Montain kabupaten Belu

Pembangunan zona Inti meliputi:

1. Bangunan utama
2. Pemeriksaan kargo kedatangan
3. Pemeriksaan kargo keberangkatan

4. Bangunan carwash/disinfectant
5. Bangunan jembatan timbangruk
6. Rumah pompa
7. Gerbang Tasbara (guard house)
8. Bangunan pemindai t

Infrastruktur pendukung:

Pengembangan infrasrtruktut pemukiman berupa:

1. Penyediaan air minum
 - a. Pembangunan sumur bor di Dusun Weibenahi, seroja , Weinggris, Talikaran, Abad Fatuala, Lokafehane
 - b. Pemasangan pipa untuk mlayani desa Silawan, Kenebibi, jenilu, Dualaus
 - c. Pembangunan reservoir
2. Pengelolaan air limbah dengan pembangunan septic Tank
3. Pengelolaan sampah
 - a. Pembangunan landasan kontaimner
 - b. Pelathan pemilahan sampah dan composting sampah.
4. Peningkatan jalan lingkungan dan drainage.

Kawasan Pintu Lintas Batas Negara Montain



Sumber : dokumen Penelitian 2018

5.1. Arah Kebijakan Pemerintah di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste

Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Terkait RTRKP di NTT, Perpres Nomor 179 Tahun 2014 mengatur bahwa deliniasi (wilayah) pengaturan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT mencakup kawasan perbatasan di darat dan di laut. Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Sedangkan, kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, Garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut Provinsi NTT ini meliputi pula Pusat Kawasan Strategis

Nasional (PKSN) dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan Negara Provinsi NTT. PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Salah satu fungsi PKSN adalah sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (Custom, Immigration, Quarantine, and Security/CIQS). Pada kawasan perbatasan Negara di Provinsi NTT sendiri ditetapkan 3 PKSN, yaitu PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor, PKSN Atambua di Kabupaten Belu, dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT sendiri bertujuan untuk mewujudkan kawasan berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara (security), kawasan berfungsi sebagai lindung yang lestari (sustainability), dan kawasan budi daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing (prosperity).

Pada 31 Maret 2015, bertempat di kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi NTT, BNPP bersama Kementerian/Lembaga terkait melakukan sosialisasi Perpres Nomor 179 Tahun 2014 yang telah disahkan Presiden Jokowi tersebut. Pengelolaan dan pengembangan kawasan Perbatasan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Badan Negara Pengelola Perbatasan (BNPP baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah). pengembangan dan Pengelolaan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat secara aktif melibatkan pemerintah Daerah. Keterlibatan pemerintah daerah untuk ikut dalam proses tersebut terlihat dengan adanya kewenangan untuk mengatur tata kelola di wilayah perbatasan. Untuk wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan wilayah Negara

Timor Leste. Pemerintah membuat kebijakan dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 -2030, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun , Bab I pasal 24 tentang Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia dan pasal 25 tentang Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Pengelolaan kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur dinyatakan dengan jelas dalam Peraturan presiden RI no. 179 th 2014 tentang pengelolaan tata ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan Perbatasan Negara. Pemerintah dengan serius mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan pengelolaan kawasan Perbatasan. Peraturan tersebut memuat tentang masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan Perbatasan Negara. Masyarakat dalam hal ini mencakup orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang

5.2. Pembangunan Kawasan Perbatasan Wini

Sejak ditetapkannya Kawasan Perbatasan Indonesia –timor Leste di Pos Lintas Batas Negara Wini – Oecusse tahun 2000. (BPPD TTU: 2012,16).Penetapan tersebut ,diikuti penerapan aturan –aturan melintas keluar masuk barang dan manusia diantar dua Negara. Masyarakat di sekitar kawasan perbatasan Ocusse atau sebaliknya pada saat melintas harus melalui prosedur birokrasi dipintu batas Negara. Prosedur birokrasiyang sebelumnya tidak mereka temukan dalam tata nilai adat ketika mereka masuk dan keluar daerah Wini- Oecusse.

Masyarakat Oecusse dan Wini di kecamatan Insana Utara merupakan masyarakat adat yang mempunyai ikatan emosional dengan dasar kesamaan hubungan sosio cultural . Ikatan tradisional yang tumbuh membentuk ikatan komunal yang didasarkan pada tatanilai tradisonal masyrakat adat. Ikatan komunal masyarakat adat mulai mengalami perubahan pada saat terjadi desintergrasi politik di wilayah Timor yangmenjadi dua Negara. Wilayah Oecusse menjadi bagian enclave dari Negara Republik Demokrat Timor Leste dan wilayah Insana Utara dengan batas Wini masuk dalam wilayah Indonesia

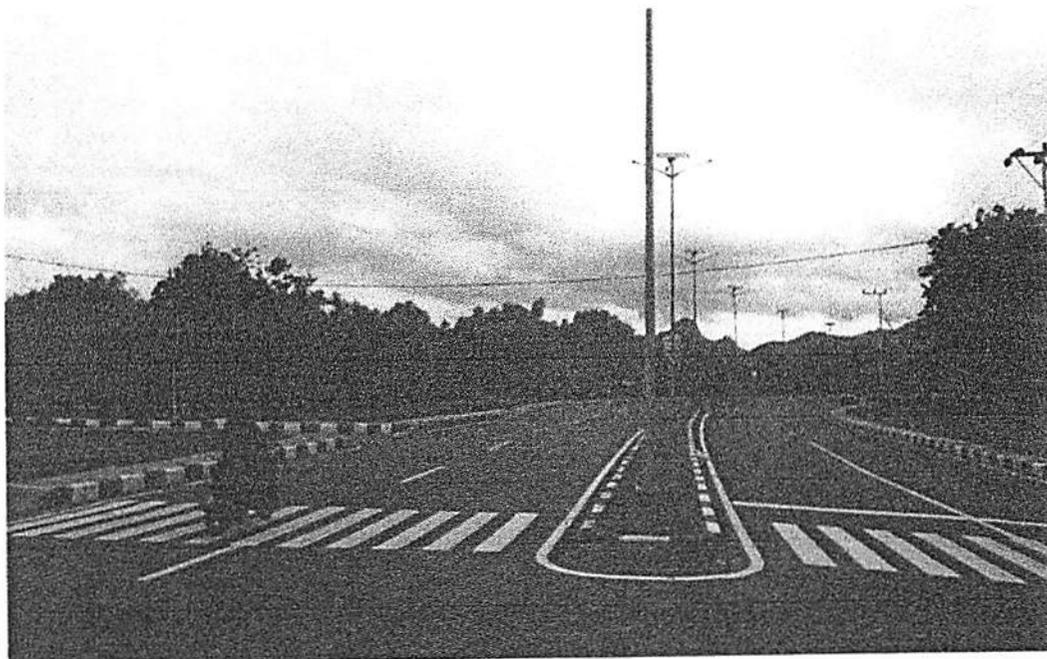
Upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan dan pengelolaan kawasan perbatasan terus dilakukan perubahan strategi pendekatan keamananan pada awal penetapan wilayah batas mulai diikuti dengan strategi pendekatan prespority .kebijakan tersebut didasarkan pada kebutuhan keamanan di wilayah perbatasan yang baru dibentuk dan juga pertimbangan bahwa masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste merupakan mempunyai ikatan sosio cultural yang kuat. Dengan

menerapkan prosedur birokrasi di pintu perlintasan Negara dan membentuk perilaku birokrasi yang bersifat legal tradisonal.

Pada tahun 2015 pemerintah menerapkan pembenahan birokrasi di perlintasan Negara dengan mengacu pada standar birokrasi modern di pintu perlintasan Negara Wini- Oecusse. Tata kelola di kawasan Perbatasan Wini – Oecusse dilakukan dengan birokrasi standar internasional dan penggunaan sarana prasarana modern. Tata kelola di kawasan perbatasan dilakukan oleh Badan Negara Pengelola Perbatasan di tingkat Pusat dan Daerah dengan bekerjasama dengan dinas imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina dan Kesatuan TNI-POLRI.

Perubahan dari birokrasi legal tradisonal menjadi birokrasi legal formal serta penggunaan sarana prasarana modern mendorong terbentuknya adaptasi adaptasi bagi masyarakat adat terhadap perubahan yang ada di lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan meliputi adaptasi baik secara personal maupun ditingkat institusi adat. Di lain pihak pemerintah juga melakukan upaya aktif pendekatan terhadap masyarakat adat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat adat untuk menjadi bagian dan secara aktif terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan termasuk di kawasan Wino-Oecusse.

Gambar pembangunan jalan arteri menuju Kawasan Perbatasan



Sumber: Sumber :[Lhttps://bisnis.tempo.co/read/1053556/pupr-pembangunan-infrastruktur-perbatasan-timor-leste-dikebut](https://bisnis.tempo.co/read/1053556/pupr-pembangunan-infrastruktur-perbatasan-timor-leste-dikebut) 28 Maret 2018

Pembangunan Zona inti di Perbatasan Wini

1. Bangun utama
2. Bangunan utamaastuktur
3. Bangunan carwash
4. Bangunan jembatan timbang
5. Bangunan peminai kendaraan (x –ray)
6. Bangunann pemeriksaancargo kedatangan
7. Bangunan pemeriksaan terpadu keberangkatan
8. Gudang sita berat dan ringan
9. Bangunan pemeriksian cargo keberangkatan

10. Bangunanutilasi
11. Kennel
12. Check point
13. Monument dan gerbang Tasbara
14. Helipad.

Dibangun 22 desember selsai 15 desember 2016

Pengembangan infrastruktu pemukiman berupa:

1. Penyediaan air minum
 - a. Sistim pengairan grafitasi (SPG) dari sumber air Leolboko untuk melayani darh Hamusu C2
 - b. SPG dari sumber air Oeljak untuk melayani desa Hamusu C2
 - c. SPG dari sumber air Fautmet untuk melayani desa Oesoko
2. Pengeloaan air limbah dengna pembangunan septic tank
3. Pengelolaan sampah
 - A, pembangunan landasan container
 - c. Pelatihan pemilhan dan composting sanpah
4. Peningkatan jalan lingkungan dan drainase
 - a. Ruas jalanHamusu
 - b. Ruas jalan koko
 - c. Ruas jalan Oesoko
 - d. Selasai 11 september 2017

Pintu Lintas Batas Negara Wini Insana Utara



Sumber dokumen Penelitian 2018

5.2. Kawasan Perbatasan Montamasin.

Kawasan Perbatasan Motamasin berada di desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timor. Daerah Motamasin berbatasan dengan wilayah Timor Leste yang berseberangan dengan wilayah Distrik Covalima Timor Leste dan batas Laut Timor (BPS: Kabupaten Malaka, 2017). Pada tahap pertama pembangunan kawasan perbatasan Montamasin sampai tahun 2017 masih termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Belu. Seperti pengembangan wilayah perbatasan lainnya wilayah perbatasan Motamasin di bangun dengan sarana dan prasana yang menyesuaikan dengan standar PLBN internasional

Sampai tahun 2015 penerapan tata kelola kawasan Perbatasan masih di bawah koordinasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupten Belu, namun setelah ada

perubahan struktur pengelolaan maka kawasan Perbatasan Montamasin di bawah Koordinasi pengelolaan Badan Negara Perbatasan Negara.

Masyarakat di kawasan perbatasan Montamasin di huni oleh beberapa kelompok masyarakat adat yaitu Suku Melus atau Suku Kanurawan, Suku Mataus, Suku Dawan (Sonbai), menyebut diri mereka dengan sebutan *Emafatuk Oan Ema Oi Oan*.

Pemerintah Kabupaten Malaka menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan Perpres no 147 tahun 2014 dengan melakukan perubahan birokrasi PLBN di Pintu Lintas Batas Negara. Sampai tahun 2015 pemberlakuan administrasi di PLB Montain menggunakan sistem birokrasi Legal Tradisional. Penerapan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap birokrasi di perlintasan Negara dengan masih mereapkan kelonggaran administrasi dan mempertimbangkan pada birokrasi tradisional masyarakat adat. (wawancara Ketua BNPP Kabupaten Malaka, 2018)

Berlaku, mulai tahun 2015 diadakan modernisasi Birokrasi dengan melakukan birokrasi Formal PLBN . Konsekuensi yang harus di lakukan dengan birokrasi ini maka adanya tertib administrasi dengan standar internasional.

Pembangunan infrastutur Motamasin kabupaten Malaka.

1. bangunan utama
2. bangunan carwash
3. bangunan jembatan timbang
4. Klinik
5. Bangunan pemeriksaan cargo kedatangan

6. Bangunan pemeriksaan terpadu mobil pribadi dan umum
7. Gudang sita berat dan ringan
8. Lapangan penilbunan
9. Bangunan pemerikss
10. Kennel
11. Check point
12. Monument tasbara
13. Gerbang tasbara
14. Bangunan utilitaan cargo eberangkatan

Proses pembangunan kawasan perbatasan 23 desember selesai 16 desember 2016

Pembanguna infrastruktur pemukiman

1. Penyediaan air minum
 - a. Rehabilitasi brancaptering mata air saluhu
 - b. Pengadan pipa dan pemasadsangan pipa
 - c. Pembangunan reservoir dari mata air Seli untuk melayani Desa Rainawe
2. Pengeloaan limbah
Pembangunan setic tank komunal
3. Pengelolaan sampah
4. Pebangunan landasan container
5. Pelatihan pemilahan dan composting sampah
6. Peningkatan jalan lingkungan dan drainase.

Kawasan Pintu Lintas Batas Negara Montamasin



Sumber Dokumen Penelitian 2018

Pola pembangunan yang dianut pemerintah sekarang adalah dengan menggunakan pola bottom up planning yaitu perencanaan pembangunan yang dimulai dari dusun (Musrenbangdus sampai dengan Musrenbangprov di provinsi, bahkan sampai pada level pemerintah pusat Musrenbangnas. Pola pembangunan ini mengandung prinsip desentralisasi dan demokrasi local yang berkaitan dengan penempatan Kabupaten / Kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan masyarakat pembangunan di wilayah yuridiksinya dan prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan menganut dua filosofi dasar yaitu *public touch and bringing the public in* yaitu sebuah kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan public dan mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dalam ruang-ruang kebijakan sehingga disebut juga pembangunan partisipatif. Model kebijakan ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan dan program pemerintah Provinsi NTT dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
5. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup
7. meningkatkan akses perempuan, anak dan pemuda dalam sector public, serta meningkatkan dan pembangunan daerah rawan bencana alamperlindungan terhadap perempuan anak dan pemuda

8. mempercepat penanggulangan kemiskinan , pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah kepulauan erwujudnya masyarakat untuk mendorong yang berdaya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat (*empowerment society*) yang komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan membangun sinergi antara pemerintah dan dan melalui perencanaan program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai social dan kearifan local.(Zubaidi, 2007)

Pembangunan di wilayah perbatasan dimulai dengan perencanaan tata ruang yang tercantum dalam: Perpres.

5.4. Membangun Peradaban di Batas Negara : Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia- Timor Leste

Pembentukan kawasan perbatasan Indonesia –Timor Leste terjadi setelah terjadi perpecahan wilayah Timor Timur menjadi dua wilayah politik yaitu Indonesia dan Timor Leste pada tahun 1999. Kesepakatan yang dibuat pihak Indonesia dengan UNTAET (*United Nation Transsition Administrasi for East Timor*) menyebutkan bahawa kedua belah pihak sepakat untuk membentuk badan bersama penegelolaan perbatasan yaitu Joint Border Committee (JBC) . Kedua belah pihak juga menyepakati untuk menentukan titik-titik perbatasan baik darat maupun laut. Di wilayah perbatasan Indonesia -Timor Leste disepakati 49 tugu Common Border Datum Reference Frame (CBRDF) sebagai dasar pengukurannya (Eni Sugiarti: 2015. 29). Perbatasan antara Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Timor Leste terletak di 4 Kabupaten , yaitu Belu, Kupang, dan Timor Tengah Utara (TTU)., Alor sedangkan wilayah NTT yang berbatasan dengan Australia berada di Kabupaten Rote Ndao (Eni Sugiarti: 2014, 34).

Tabel 1. Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Perbatasan Negara Asing

Wilayah /Kabupaten	Kecamatan	Negara
DARAT		
1. Belu	Raihat Lakmanen Tasifeto Timur Tasifeto Barat Kobalima	Timor leste distrik Bobonaro dan distrik covalima
2. TTU	Insana Insana Utara Miomaffo Timur Miomaffo Barat	Timor Lester Distrik Oecusse
3. Kupang	Amfoang Utara	Timor Leste Distrik Oecusse
LAUT		
1. Alor	Alor Timur Alor Barat Daya Pantar	Timor Leste distrik Bobonaro
2. Rote Ndao	Rote Barat Daya Rote Barat Laut Lobalain Rote Tengah Pantai Baru Rote Timur	Australia

Sumber: Ati Widiarti , Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Antar Negara di Provinsi NTT , dalam Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia , Vol (no 3 Desember 2007)

Pada awal pembentukannya pengawasan dan pengelolaan kawasan Perbatasan Negara Indonesia Timor Leste sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan pendekatan *security approach* . Selain itu dengan mempertimbangkan kawasan – kawasan perbatasan Indonesia _Timor Leste merupakan kawasan perbatasan yang baru dibentuk sehingga pendekatan pengawasan dan pengelolaan dengan mengedepankan *security approach* mengingat masa-masa pertahanan dan stabilitas keamanan di wilayah baru.

Kondisi di Pintu Perbatasan batasa Negara Indonesia – Timor Leste dilengkapi dengan fasilitas dan prasanan sarana serta pelayanan administrasi, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan fasilitas di perbatasan yang baru dibentuk di pintu perbatasan Indonesia – Timor Leste masih minim. Sampai tahun 2015 fasilitas yang beroperasi dengan baik Pos Perbatasan TNI dan pelayanan imigrasi. Sedangkan instansi terkait seperti Bea Cukai , karantina tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya pengawasan keluar masuk barang dan orang di pintu perbatasan masih didasarkan pada pertimbangan pertimbangan non formal. Penerapan birokrasi modern di pintu perlintasan Negara dengan standar internasional belum sepenuhnya dapat dilakukan di wilayah ini. Dengan memperhatikan bahwa masyarakat di kedua Negara mempunyai persamaan ikatan tradisi dan ikatan sosio cultural serta emosional sehingga klaim klaim hak hak tradisonal lebih mengemuka menembus batas batas-batas aturan politik formal. Selain itu paradigma pemerintah Indonesia terhadap kawasan perbatasan sebagai wilayah terluar menjadikan distribusi akses-akses kemajuan seringkali tidak tersentuh dan lebih mengandalkan pada sector keamanan. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan menjadi wilayah yang kurang diperhatikan dan kecenderungannya menjadi kantong-kantong baru masyarakat yang tertinggal. Beberapa permasalahan yang muncul di perbatasan antara lain:

1. kaburnya garis pembatas wilayah NKRI, danrusaknya patok yang menyebabkan keterancaman kedaulatan wlayah RI di bebrapa titik batas wilayah terutama yang berkaitan dengan adanya tanah ulayat yang dimiliki olrh warga adat yang ada di di Timor Leste dan warga adat yang ada di Indonesia.

2. Belum terintegrasinya pengelolaan kawasan lindung lintas negara dalam program kerjasama antar Negara RI- RDTL

3. Kurang sinkronnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan di kawasan perbatasan antar Negara oleh beberapa instansi pemerintahan (pusat dan daerah) sehingga perlu adanya koordinasi yang terpadu untuk dan melibatkan beberapa pihak pengambil kebijakan

4. Belum terkoordinasinya antara pengelola sumber daya sehingga eksploitasi sumber daya alam tidak secara maksimal dapat menguntungkan pemerintah maupun masyarakat lokal.

5. Belum terselenggarakannya sistem pelayanan satu atap antara lembaga Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina sehingga proses pendataan arus barang dan orang yang melintas belum tercatat dan terpantau dengan baik. CIQ (Customs- Immigration- Quarantine idealnya berada dalam satu atap. Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe pertama berada di Atapupu yang membawahi beberapa wilayah kerja yang luas yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Alor. (Eni Sugiarti; 2015. 98)

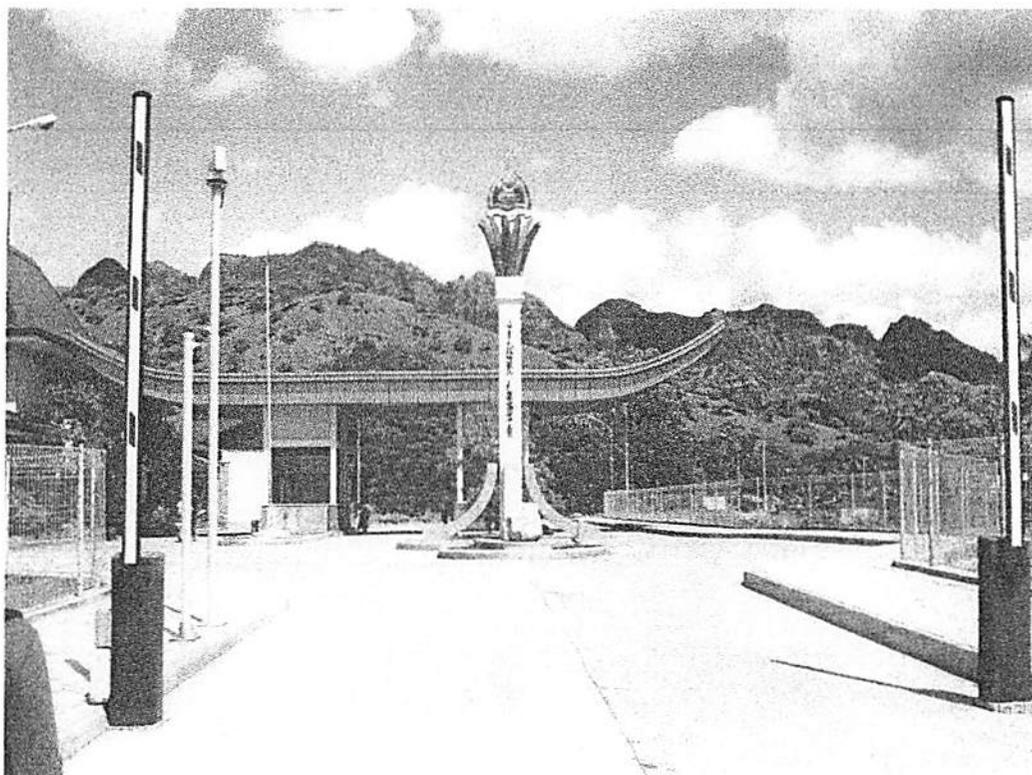
6. Belum adanya kepastian hukum bagi instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan antar Negara.

7. adanya kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana wilayah kedua Negara, berupa jaringan jalan dan moda transportasi darat, jaringan dan kapasitas telekomunikasi, jaringan dan daya pasang listrik, jaringan informasi, dan infrastruktur lainnya.

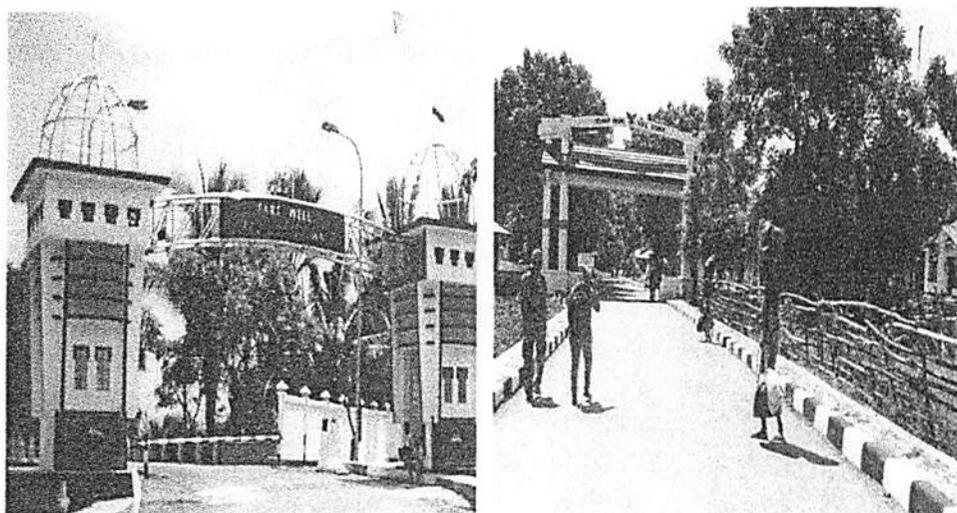
Perkembangan kemajuan kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste sampai

tahun 2015 lebih diperlihatkan oleh pemerintah Timor Leste yang nota benenya sebagai Negara baru. Apabila dianalogan kondisi dipintu perbatasan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Timor Leste seperti gambaran Gelap dan terang paling tidak ketika berada di tapal batas . Pembangunan fisik di Timor Leste di pintu pos perbatasan dibangun dengan megah dan sistem penerangan dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pintu masuk Indonesia yang cenderung gelap dan dengan bangunan yang sangat standar untuk ukuran pintu masuk Negara.

Gambar 1 : Pintu Gerbang Masuk Perabatasan Timor Leste



Gambar 2 Pintu Gerbang Masuk Indonesia



Sumber : Dokumen penelitian 2014

Kondisi yang sangat berbeda dengan Gerbang pos perbatasan di kawasan Negara Timor Leste

Pelayanan administrasi masih bersifat manual dengan sarana fisik dan juga ketersediaan tenaga petugas yang terbatas. Keterbatasan akses internet yang masih sangat terbatas, penerangan listrik dengan kapasitas daya yang terbatas. Akses jalan yang masih terbatas.

5.5. Mempercantik Wajah dan Strategi adaptasi Masyarakat Adat di Perbatasan Indonesia – Timor Leste

Upaya pemerintah tersebut pada hakekatnya dapat meminimalisasi kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain pada relitanya masih dalam kategori wilayah atau daerah tertinggal (Depdagri, Dirjen Pembangunan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan:

2009). Mensikapi terhadap adanya globalisasi wilayah perbatasan, dalam batas-batas tertentu wilayah tersebut dapat menjadi wilayah yang strategis yang di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik dalam pengertian sumber daya alam maupun manusia serta pengembangan sistem yang ada. Namun juga dapat menjadi ancaman yang berkaitan dengan adanya intervensi politik, budaya maupun sosial dari negara tetangga yang dapat mengancam integrasi dan kedaulatan negara.

Merujuk pada Peraturan Presiden no 179 tahun 2014, pemerintah mendorong adanya keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan di kawasan perbatasan. Keterlibatan masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste memerlukan perhatian yang serius berkaitan dengan adanya persamaan akar sosial kultural masyarakat di dua negara. Selain itu masyarakat di Perbatasan Indonesia Timor Leste tumbuh sebagai masyarakat adat yang terikat dengan nilai nilai adat.

Penduduk asli NTT terdiri dari berbagai suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah NTT (Eni Sugiarti, 2013 25-26). Adapun suku-suku dan lokasinya di NTT sebagai berikut:

1. Helong : Sebagian wilayah Kabupaten Kupang (Kec.Kupang Tengah dan Kupang Barat serta Semau).
2. Dawan : Sebagian wilayah Kupang (Kec. Amarasi, Amfoang, Kupang Timur, Kupang Tengah, Kab Timor Tengah selatan, Timor Tengah Utara, Belu (bagian perbatasan ndengan TTU).
3. Tetun : Sebagian besar Kab. Belu dan wilayah Negara Timor Leste.
4. Kemak : Sebagian kecil Kab. Belu dan wilayah Negara Timor leste.

5. Marae : Sebagian kecil Kab. Belu bagian utara dekat dengan perbatasan dengan Negara Timor Leste.
6. Rote : Sebagian besar Pulau Rote dan sepanjang pantai utara Kab. Kupang dan Pulau Semau.
7. Sabu/Rae Havu : Pulau Sabu dan Raijua serta beberapa daerah di Sumba.
8. Sumba : Pulau Sumba.
9. Manggarai Riung : Pulau Flores bagian barat terutama Kab. Manggarai dan Manggarai Barat.
10. Ngada : Sebagian besar Kabupaten Ngada.
11. Ende Lio : Kabupaten Ende.
12. Lamaholor : Kabupaten Flores Timur meliputi Pulau Adonara, Pulau Solor dan sebagian Pulau Lomblen.
13. Kedang : Ujung timur Pulau Lomblen.
14. Labala : Ujung selatan Pulau Lomblen.
15. Pulau Alor : Pulau Alor dan Pulau Pantar.
16. Sikka-Krowe Muhang: Kabupaten Sikka

Masyarakat perbatasan Wini terbentuk dalam masyarakat dengan kompleksitas suku yang rendah, dalam arti masyarakat Wini merupakan masyarakat yang didominasi oleh suku Dawan, sedangkan dibandingkan dengan masyarakat Belu kompleksitas masyarakat lebih banyak meskipun didominasi oleh masyarakat Tetun. Kompleksnya penduduk yang mewarnai negeri Timor ini, namun secara garis besar penduduk ini dapat dibagi dalam dua kelompok besar. *Pertama*, Orang Belu Timur, melihat bahwa orang-orang ini menunjukkan persamaan dengan penduduk barat dari

kepulauan Melayu. Dalam perjalanan selanjutnya orang Belu menyebut dirinya 'Dawan'. Walaupun kata ini tidak pernah digunakan oleh mereka sendiri. Dawan sebenarnya adalah nama orang, yakni leluhur dari marga Sonba'i yang pertama. *Kedua*, adalah orang Timor khusus pegunungan yang ada di bagian tengah dan darat dari kepulauan Timor. Catatan terakhir tentang tipe penduduk ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di Irian. Lebih lanjut orang Timor khusus menyebut dirinya sebagai 'Atoin meto', orang *Meto* menyebut orang Belu dengan sebutan *Kaes Belus*. Koetjoroningrat menuliskan bahwa ciri-ciri tubuh orang *Atoni* lebih banyak dipengaruhi unsur Melanesia, jika dibandingkan dengan penduduk Timor yang lain, kebanyakan bertubuh pendek, ukuran kepala *brachyceephal*, berkulit cokelat kehitam-hitaman dan berambut keriting. Sebutan 'Atoin' yang sebenarnya adalah untuk orang *Meto*, dan menurut orang *Meto* sebutan *Atoni* sangat kasar sekali dan tidak tepat artinya. Istilah *Atoni* sebenarnya berarti manusia. Sehingga sebutan *Atoin Meto* artinya adalah manusia Timor yang berdiam di Pegunungan. Karena itu orang Kupang menyebut mereka datang dari pedalaman atau disebut dengan 'orang gunung'. (Koentjaraningrat, 1993, 206)

Masyarakat adat dalam kehidupannya sangat terikat dengan nilai-nilai adat sebagai orientasi dalam membentuk aktivitas kesehariannya

Masuknya birokrasi modern dianggap sebagai hal baru dengan dua sisi mata uang di satu sisi direspon secara positif sebagai bagian dari perkembangan yang akan membawa kemajuan, namun di sisi lain dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan bagi keberlangsungan tatanan nilai adat yang telah ada. Dengan demikian perlu diperhatikan oleh masyarakat adat maupun pihak pemerintah.

Permasalahan yang sama juga dihadapi masyarakat adat di perbatasan di dua Negara menghadapi dua model birokrasi sekaligus yaitu birokrasi tradisional yang berakar pada tata nilai adat dan birokrasi formal administrasi yang merujuk pada tata atur nasional maupun internasional

Pada tanggal 23 Agustus 2016 di Alor, provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan tentang *Percepatan Pengembangan Wilayah Perbatasan*. Salah satu wilayah yang dibahas dalam rapat tersebut adalah percepatan pengembangan di wilayah perbatasan yang ada di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Pemerintah akan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu di Nusantara yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dalam kunjungan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan memotivasi daerah khususnya NTT sebagai daerah perbatasan wilayah Indonesia yang ada di bagian selatan. (Eni Sugiarti, 2016, hlm.35)

Upaya percepatan pengembangan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain melibatkan kerjasama beberapa kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, BUMN serta BNPP. Dalam upaya percepatan pengembangan wilayah tersebut maka pemerintah melakukan perencanaan strategis yang akan digunakan, yang meliputi tiga strategi yaitu pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan lingkungan. Pendekatan keamanan ini berkaitan dengan ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pendekatan kesejahteraan

berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan lalu lintas perdagangan, sedangkan pendekatan lingkungan adalah dengan membangun kawasan perbatasan yang meliputi 187 kecamatan yang ada di wilayah Indonesia.

Masyarakat di perbatasan NTT tumbuh dari masyarakat adat yang bersifat komunal dan menggunakan tata nilai adat sebagai bagian dalam kehidupan mereka. Penerapan mengharuskan adaptasi masyarakat adat dalam proses tersebut. Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan sudah dimulai pada tahun 2014 dan mulai diterapkan dengan diresmikannya pengoperasian tata kelola di perbatasan pada tahun 2017.

Posisi di wilayah perbatasan pada akhirnya meenjadikan aktivitas-aktivitas kehidupan yang ada dalam masyarakat terkontrol secara ketat oleh Negara. Kepentingan Negara ditempatkan di atas kepentingan-kepentingan lainnya termasuk penyelenggaraan kehidupan adat. Keterlibatan adat yang masih sangat minim dalam penyelesaian masalah karena :

1. Belum terakomodir kepentingan-kepentingan adat terkait dan masih sangat minimnya penghormastan terhadap adat masyarakat adat. Masyarakat adat belum terakomodir dalam kehidupan sehari-hari di perbatasan. Belum dilibatkannya komponenn adat dalam penyelesaian persoalan di perbatasan sevara mendalam. Terdapat pemeo orang Timor, ” kita terpisah secara politik tetapi tidak secara kulutural.
2. Pada kenyataaanya peran lembaga adat masih bersifat simbolis dan belum berperan secara signifikan

Memasuki pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan dengan masuk era modernisasi birokrasi dan sarana prasarana, masyarakat adat mau tidak mau ikut dalam proses perubahan tersebut. Masyarakat adat secara bertahap melakukan beberapa adaptasi baik adaptasi terhadap lingkungan fisik yang abaru dengan konsep tata lingkungan baru maupun adaptasi terhadap sistem nilai baru yang dbawa dalam birokrasi modern di kawasan perbatasan dalam bentuk birokrasi lintas Negara.

Proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dimulai dengan adanya kebijakan pemerintah menempatkan wilayah perbatasan sebagai “Beranda Negara” sebagai Garda depan Negara. menurut Haviland sebagai proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organism pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organsme. Penyesuaian dua arah seperti ini perlu agar semua bentuk kehidupan dapat bertahan hidup termasuk manusia (Haviland 1993: 3).

5.6. Modernisasi Birokrasi dan Pembangunan Sarana Dan Prasana Modern di Pintu Perbatasan Indonesia- Timor LEste

Perubahan besar dan cepat seringkali menimbulkan adanya keterkejutan tidak terkecuali pada masyarakat di perbatasan. Pembangunan infrastruktur secara besar- besaran dan dilakukan dalam waktu yang relative cepat diibaratkan seperti permainan sulap “*sim salabim*” . di salah satusisi perubahan tersebut menumbuhkan rasa kebanggaan dan percaya diri dalam masyararakat diperbatasan “yang merasa diperhatikan dan dianggap “oleh Pemerintah Pusat dan rasa percaya diri sebagai bagian masyarakat yang diberi kesempatan untuk menikmati kemajuan, namun juga

mensisakan permasalahan adanya ketercerabutan dari dasar nilai kehidupan sebagai masyarakat adat. Masyarakat melihat dan merasakan adanya hal peminggiran nilai-nilai adat kebiasaan yang ada dengan aturan aturan formal.

Penyediaan sarana pendukung yang berbasis teknologi juga menjadi gencar dengan di mulainya listrikisasi di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh Listrik . dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya listrik adalah menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang gelap disamping itu roda perekonomian sangat erdukung dengan penggunaan listrik. Sebagai contoh yang terjadi di kawasan pLBN Montamasin. Wilayah yang semula terisolir menjadi wilayah modern dengan penggunaan listrik yang semakin mudah.

Tabel 3. Jumlah Daya dan Pelanggan PLNdi Kecamatan Kobalima kabupaten

Malaka

Desa			Tahun 2017	
	Daya	pelanggan	Daya	Pelanggan
Alas Selatan	450	42		694
Kota Biru	900	69		1012
Alas	1300	37		92
Alas Timur	2200	1		2

Sumber : BPS Kecamatan KObalima Dalam Angka tahun 2017 dan tahun 2017

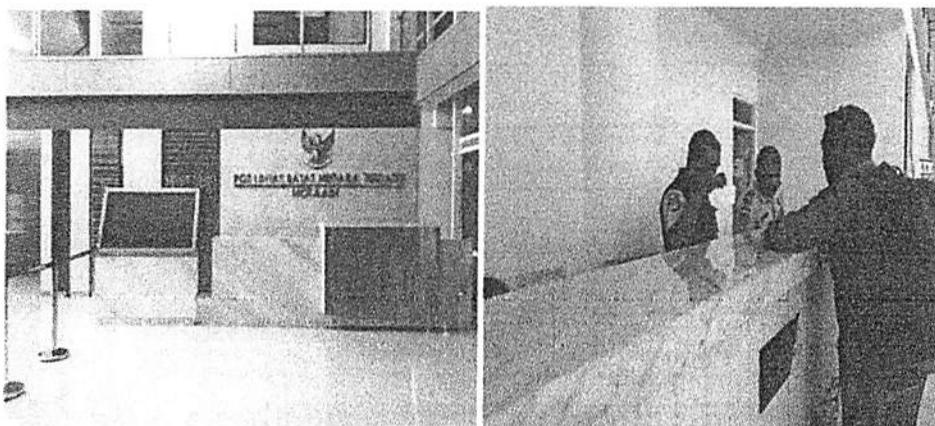
Roda perekonomian juga terdukung dengan adanya listrik seperti tabel di bawah ini

Tabel 4. Banyaknya Usaha Sektor Perdagangan menurut Jenis Usaha di
Kecamatan Kobalima

Desa	Pedagang besar		Pedagang menengah		Pedagang kecil		Rumah makan	
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Alas Selatan	-	-	1	4	13	21	1	1
Kota Biru	-	-	-	1	6	11	-	-
Alas	-	-	-	2	12	12	-	-
Alas Timur	-	-	-	1	8	8	-	-

Sumber: BPS kecamatan Kobalima Dalam Angka tahun 2015 dan tahun 2016

Gambar 3 Pelayanan birokrasi yang modern di Pos Lintas Batas Negara



Sumber dokumen penelitian 2018

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia BNPP melibatkan pegawai –pegawai baik pegawai mutasi dari beberapa instansi pemerintah Daerah

maupun pegawai baru yang sebagian berasal dari luar etnis maupun luar daerah NTT. Keberadaan mereka mau tidak mau memberi pengaruh terhadap kemajemukan etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kemajemukan ini dalam konteks homogenitas cultural masyarakat adat menjadi ancaman budaya dengan terjadinya pembiasaan budaya lokal.

Gambar 4: Pegawai Imigrasi yang multi etnis



Sumber: dokumentasi penelitian 2018

Arus persinggungan budaya luar semakin besar dengan makin berkembangannya teknologi di Kawasan Perbatasan. Penggunaan teknologi canggih seperti droun misalnya membawa dampak besar terhadap pengawasan jalur-jalur jalan tikus ataupun jalur –jalur yang biasa dilakukan pertemuan-pertemuan adat dari dua warga Negara Indonesia-Timor Leste. Kebiasaan pertemuan tanpa melalui prosedur formal Negara menjadi semakin hilang dengan adanya pengawasanyang semakin ketat. Kebiasaan melintas batas dan pertemuan satu masyarakat adat yang semula dengan di dasarkan pada aturan adat menjadi terkendala dengan prosedur formal tersebut. Seperti kebiasaan bercerita tutur dalam satu masyarakat adat yang

dilakukan saat bulan purnama tidak sertamerta dapat dilakukan . Kebiasaan memberikan undangan secara manual pertemuan adat tergantikan dengan undangan elektronik dengan dibangunnya tower telkomsel dan listrikisasi yang menjangkau wilayah wilayah pedalaman. Terjadi adanya *dehumanisasi* dimana teknologi mulai menggeser tradisi pertemuan warga adat dengan penggunaan sarana teknologi tinggi dengan model pertemuan dengan media elektronik.

Program pemerintah dalam Nawacita salah satunya menjadikan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian. Dalam hal ini pemerintah hendak mengaktifkan perekonomian masyarakat dalam pusran ekonomi global .yang menjadi permasalahan adalah kesiapan dari masyarakat adat itu sendiri masuk dalam persaingan ekonomi. tersebut. Sebelumnya masyarakat di Perbatasan tumbuh dalam tingkat perekonomian yang rendah dan sistem perekonomian yang bersifat tradisional dengan pusat perekonomian pasar tradisional bahkan masih mempraktekkan praktek pasar barter dalam perekonomian masyarakat perbatasan (Eni Sugiarti 2014). Pasar juga tidak hanya tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi tetapi memiliki fungsi lain sebagai media sosial budaya dua warga negara berbeda dalam satu adat (Eni Sugiarti: 2016).

Selain itu penerapan keimigrasian menggunakan standart internasional. penegakan pada awalnya ada beberapa kendala namun lambat laun menunjukkan peningkatan dan mampu menekan tingkat pelanggaran para pelintas illegal. Kemudahan dalam birokrasi pembuatan PLB untuk memfasilitasi adanya kebutuhan masyarakat di dua Negara yang mempunyai ikatan emosional sosio kultural yang kuat dan kepentingan kepentingan sosial budaya . penggunaan PLB

memberikan ruang dan kesempatan masyarakat dua negara masing disekitar wilayah perbatasan yang berjarak 10 KM untuk dapat berinteraksi .

Gambar 5. Penggunaan mesin pendeteksi barang maupun orang PLBN



Sumber Dokumentasi Penelitian 2018

Keberadaan listrik dan sarana telekomunikasi sangat membantu masyarakat, isolasi informasi menjadi lebih terbuka dan pengaruh terhadap masyarakat adat menjadi mudah meskipun tetap komunikasi fisik *face to face* masih dilakukan terutama hal hal yang berkaitan dengan tradisi. Ibarat undangan harus sampai di rumah.

Berdasarkan pada Perencanaan tata ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2008- 2028. Bab II, Kebijakan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bagian Kedua Pasal 4 a Hierarki Orde II berada di Kota Wini sebagai

pusat kegiatan di wilayah Pantura, mempunyai fungsi pelayanan Pusat Pemerintahan Lokal maupun pusat pelayanan lainnya seperti perdagangan, industri, administrasi dan pemerintahan. Struktur tata ruang Kabupaten Timor Tengah Utara direncanakan dalam bentuk tatanan matra ruang Kota Wini sebagai Pusat Kegiatan Lokal Utama, yang sekaligus sebagai Kota Satelit. Kota Wini dengan klasifikasi sebagai kota hirarkhi orde II (PKL utama).

Pengembangan wilayah perbatasan sebagai kota Satelit membawa pengaruh terhadap perubahan dari dalam masyarakat adat. Salah satunya adalah dijadikannya pasar perbatasan sebagai pasar internasional. Pada awalnya di kawasan perbatasan terdapat pasar perbatasan yang digunakan oleh masyarakat di kedua negara Indonesia dan Timor Leste. Masyarakat. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di Timor Leste terutama di daerah Oecusse dipasok dari Indonesia (Eni Sugiarti: 2015) Pasar perbatasan yang diselenggarakan 1 bulan sekali dalam prakteknya tidak hanyaberfungsi ekonomi tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat adat dari dua Negara secara social dan kultural pasar sebagai ruang pertemuan keluarga dan pelanggaran nilai nilai masyarakat adat (Eni Sugiarti: 2016). Dengan perubahan yang ada diperbatasan maka pasar perbatasan dirumah statusnya menjadi pasar internasional.

Pembangunan secara fisik dalam tahap pembangunan, sedangkan persiapan untuk masyarakat di wilayah perbatasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten sampai desa dan melibatkan ketua-ketua adat .Sosialisasi tentang pasar internasional di lakukan oleh Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi bersama Badan Negara Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara .

Pemerintah bersama ketua adat dan pejabat desa menyepakati untuk memberdayakan potensi-potensi di wilayah perbatasan baik potensi sumber daya manusianya maupun potensi alam dan potensi perdagangan. Tercatat angka kemiskinan di Insana Utara 336 fakir miskin, 585 rumah tidak layak huni, dan 53 keluarga rentan (Badan Pusat Statistik Timor Tengah Dalam Angka 2016). Pemerintah menyediakan ruang bagi masyarakat di perbatasan untuk terlibat secara langsung dalam praktek perdagangan di pasar internasional dengan menawarkan sebagian los-los pasar dimiliki dan disewakan bagi pedagang lokal.

Penggunaan mata uang sebagai nilai tukar dalam praktek pasar internasional sangat penting. Standar mata uang adalah dolar. *Illegal money changer* banyak terjadi di pasar perbatasan dimana penentuan kurs rupiah dan dolar ditentukan oleh para pedagang uang tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menata peredaran mata uang dolar di pasar perbatasan dengan menyediakan money changer dari beberapa bank nasional (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia). Dengan adanya money changer di kawasan perbatasan untuk mempermudah pertukaran uang dan sekaligus untuk menekan terjadinya praktek *illegal money changer* yang sebelumnya banyak terjadi di wilayah perbatasan. Keberadaan money changer sangat penting terutama untuk mendukung persiapan pengoperasian pasar internasional di wilayah perbatasan.

Gambar 6: Bank yang menyelenggarakan money changer di kawasan perbatasan



Sumber : Dokumentasi Penelitian 2018

Kasadaran masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses perubahan mendorong munculnya organisasi sosial yang tumbuh dari masyarakat dengan motivator kelompok terpelajar dan mahasiswa Putra Daerah dengan membentuk Kelompok Sadar Wini. Kelompok ini merupakan kelompok sosial nir laba yang focus pada penggiatan pemberdayaan potensi di Wini. Di wini tumbuh kelompok kelompok pengrajin tenun, kelompok pembuat souvenir dan kelompok sadar wisata Wini. Kelompok kelompok ini meskipun masih dalam tahap awal namun mencerminkan adanya geliat dari masyarakat di kawasan perbatasan untuk mampu mengembangkan potensi mereka.

5.7. Partisipasi dan adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Di Kawasan Perbatasan Indonesia- Timor Leste

Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat adat di perbatasan telah dan sedang dilakukan pada tahapan kedua. Tahap pertama pada saat terjadi desintegrasi

politik yang membagi masyarakat adat menjadi dua wilayah politik. Hal ini membawa konsekuensi masyarakat adat di perbatasan Negara masuk dalam birokrasi di wilayah perbatasan Negara. Suatu hal baru bagi mereka ketika berkomunikasi, berkunjung dan berinteraksi dengan saudara mereka yang berada di wilayah politik Timor Leste. Pada tahapan ini pemerintah Indonesia maupun Timor Leste menyepakati adanya perjanjian bersama dalam Komite Border area. Penerapan Lintas Batas Negara dengan beberapa bentuk antara lain:

- a. Dimulai dengan adanya penggunaan lahan-lahan dari masyarakat baik perorangan maupun tanah komunal. Penggunaan lahan masyarakat merupakan hasil negosiasi antara ketua adat masyarakat adat dan pihak pemerintah. Proses pembebasan lahan dimulai dengan sosialisasi oleh pemerintah desa dari wilayah yang terkena pembebasan lahan antara lain Hamusu Wini dan Oesoko. Sosialisasi terhadap masyarakat melibatkan para ketua adat yaitu ketua adat Kaseli, ketua adat Nais Meko dan Ketua adat Kutete. Secara keseluruhan di wilayah Kecamatan Insana Utara terdapat 12 komunitas masyarakat adat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016: 2016). Proses pembebasan lahan melalui negosiasi antara Pengembang, pemerintah Desa dan ketua adat. Pada awalnya harga tanah per 1m² awalnya 25 ribu kemudian dikesepakatan dicapai harga 50 ribu/1m². Bargaining dari masyarakat adat dalam kesepakatan tersebut tentang penghargaan dan

penghormatan terhadap tempat2 ritual. Pembangunan fisik kawasan perbatasan yang melintasi tempat-tempat yang disakralkan masyarakat adat harus memprioritaskan dan tidak dirubah tempat yang sakral tersebut. Tempat yang disakralkan diberi akses yang lebih mudah dengan memperbaiki jalan menuju tempat . Secara umum pembebasan tanah berjalan lancar namun demikian ada sedikit kendala yang berkaitan dengan ganti rugi lahan. Solusi dari permasalahan lahan ini dengan ditundanya pembangunan infrastruktur jalan di 4 titik di wilayah Wini.

Gambar 1: Infrastruktur jalan menuju Pintu perbatatasan Wini yang terkendala dengan masalah pembebasan tanah di warga



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018.

Keterlibatan secara aktif masyarakat adat juga diperlihatkan dalam beberapa hal dimulai dengan merelakan lahan-lahan untuk jalan penghubung antar wilayah di desa tanpa ganti rugi. Selain keterlibatan dalam penyediaan lahan-lahan untuk pengembangan infrastruktur di perbatasan negara, masyarakat adat juga berkontribusi dalam pengendalian dan pengelolaan di wilayah perbatasan terutama

yang berkaitan dengan upaya penyesuaian- penyesuaian mereka terhadap perubahan-perubahan yang ada.melakukan upaya pertahanan tata nilai sebagai adat terhadap arus westernisasi yang sedang menggejala di Timor Leste. Proses adaptasi terhadap perubahan yang ada di lingkungan masyarakat adat dilakukan dengan melakukan perubahan yang secara aktif melibatkan masyarakat adat sebagai subyek. Masyarakat adat yang ada di perbatasan mensyaratkan terhadap pihak Pengelola di perbatasan melakukan penertiban tata kelakuan dan etika berpakaian pada para Pelintas utamanya yang berasal dari Timor Leste.

Menurut Kim yang dikutip Lusia Savitri adaptasi budaya sebagai proses dasar komunikasi yaitu menyampaikan pesan , medium dan penerima pesan, sehingga terjadi encoding dan decoding. Proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru proses pengiriman pesan penduduk local di lingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh individu pendatang disebut enculturation (Lusia Savitri Setyo Utami : 2015).

Kebiasaan yang berkaitan dengan “*kawin mawin*” hubungan “*feto-mone*” antar masyarakat dari dua Negara menjadi permasalahan yang penting. Perkara kawin mawin mempunyai konsekuensi yang terhadap kewarganegaraan. Praktek perkawinan dan kekerabatan pada masyarakat Timor menggunakan dua model yaitu sistem patriarkhat dan matriarkhat (Eni Sugiarti 2014). Masyarakat adat di perbatasan menghendaki adanya aturan formal yang jelas tentang perkawinana antar negara tanpa menghilangkan atura-aturan adat.

- b. Adaptasi sangat berkaitan dengan ekologi budaya. Salah satu ciri ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran yaitu cara

system budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya. Proses adaptasi budaya tidak dapat dilepasakn dari ekologi budaya yang bercirikan perhatian adaptasi pada tataran : pertama cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan total dan ekdua sebagai konsekuensi sistematis bagaimana institusi beradaptasi dan saling menyesuaikan diri Steward menjelaskan terdapat 3 prosedur adaptasi ekologi budaya yaitu (1) hubungan antara teknologi dengan lingkungan budaya sejauhmana teknologi efektivitasnya mampu daya. (2) Pola tata kelakuan yang berhubungan dengan teknologi bagaimana anggota-anggota dalam masyarakat budaya agar dapat bertahan. (3) hubungan pola-pola tata kelakuan dengan unsur lain dalam sistem budaya yang baru (Kaplan,2002: 102). Kemampuan dari masyarakat adat untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru tidak hanya berangkat dari dalam masyarakat adat itu tetapi juga ada indikator dari luar dalam hal ini pemerintah daerah untuk secara aktif mendorong masyarakat adat untuk beradaptasi. Pemerintah juga harus aktif untuk dapat menerpkan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat adat.

- c. Kekuatan dalam masyarakat adat adalah praktek praktek adat pada masyarakat dalam kehidupan sehari hari.. Keberadaan kawasan perbatasan secara langsung seringkali membatasi ruang dan tempat bagi terjadinya praktek paraktek adat. Hal ini disadari penuh oleh masyarakat adat. Masyarakat adat melakukan negoisasi dengan birokarasi formal dengan mengusulkan dan “ mensyaratkan bagi segala pengoperasian di

wilayah perbatasan yang bersentuhan dengan kepentingan adat untuk mendapat prioritas dan mendapat “dispensasi “ meskipun tidak mengesampingkan pelaksanaan birokrasi formal. Praktek ritual dan kunjungan-kunjungan ritual dalam batas toleransi administrasi masih diberlakukan. Salah satu solusinya adanya kesepakatan penggunaan PLB dan dalam situasi yang sangat mendesak terdapat beberapa dispensasi seperti penggunaan surat khusus dalam pengawasan dari dua Pos Lintas Batas Negara.

- d. Bentuk adaptasi dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Negara Pngelolaan Perbatasan dengan masyrakt adat di kawasan perbatasan adalah melibatkan secara aktif warga di sekitar kawasan perbatasan menjadi pegawai dan pekerja di Pos Lintas Batas Negara . keterlibatan masyarakat lokal menjadi bentuk kepedulian pemerintah untuk mengenalkan secara langsung aktivitas yang ada di PLBN. Mereka yang dilibatkan melalui proses seleleksi di tingkat desa yang kemudian dileseksi kembali ditingkat pemerintah. Keterlibatan masyarakat sebagian besar untuk dijadikan petugas *Cleaning Service* dan *Security*. Renaga teknik dan tenaga kasar dalam pembangunan sarana d Keterlibatan masyarakat lokal bagi masyarakat sebagai pembelajaran masuk dalam birokrasi formal dalam bentuk pelayanan publik dan menjadikan mereka masuk dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik internasional.

Percepatan Pembangunan , modernisasi tata kelola di perbatasan Negara Indonesia Tiumor Leste mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dengan mendasarkan pada Perpes 179 tahun 2014 maka pemerintah memberikan ruang bagi ketelibatan secara aktif masyarakat adat dalam proses pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden tersebut tersebut masyarakat adat juga mempunyai ruang untuk mempertahankan nilai-nilai adat mereka dengan menyesuaikan aturan formal yang ada dan tetap mengedepankan fleksibilitas adat mereka. Masukannya birokrasi modern di tengah-tengah aturan adat yang asih kuat tidak serta merta di pahami sebagai keterancaman bagi tatanan nilai namun juga di jadikan sebagai bagian dari perkembangan yang menyertai penerapan aturan-aturan adat dan perilaku adat ditengah-tengah perubahan.

Meskipun pembangunan prasarana dan sarana di kawasan perbatasan menimbulkan keterkejutan budaya sebagai perubahan yang *sim saalbim* dan tidak sedikit menimbulkan *gap* antara namun secara umum pembangunan yang cepat di perbatasan membawa perubahan yang baru bagi munculnya kejuatan dan kemudahan bagi terbukannya isolasi masyarakat adat yang mulai tersentuh dengan kemajuan-kemajuan jaman.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Perubahan birokrasi dan ketersediaan sarana prasana yang lengkap dan berbasis teknologi modern membawa pengaruh bagi masyarakat adat. Didapat diekakan bahwa pengaruh perubahan dalam masyarakat tidak hanya dalam penggunaan fasilitas yang relative baru dan terkadang menyebabkan adanya *shock culture* pada sebagian masyarakat. Masyarakat adat yang berada di kawasan perbatasan secara langsung bersinggungan dengan perubahan-perubahan yang cepat di wilayahnya. Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara langsung menjadi subjek sekaligus sebagai objek dalam perubahan.

Perubahan di kawasan perbatasan dimaksnai sebagai kemajuan namun juga menjadi semacam ancaman bagi keberlanjutan tatanan-tanan adat. Modernisasi yang membawa kemudahan bagi akses mobilitas manusia dan barang juga masuknya isu-isu global dengan kemajuan teknologi . hal ini sedikit banyak dirasakan oleh masyarakat adat yang ada di kawasan perbatasan. Pengembangan wilayah perbatasan tidak hanya pada tataran pembuatan kebijakan dan penerpan program strategis . Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan perlu melibatkan secara aktif dan berkelanjutan masyarakat adat sebagai bagian dalam proses kedepannya. Dengan demikian perlu melakukan pendekatan secara intensif sehingga proses pembangunan tidak menyebabkan ketercerabutan masyarakat adat dari akar budaya dan merasa terasing di tempatnya.

Negara Timor Leste dalam beberapa hal berkiblat pada kultur budaya Barat dan pola perilaku perkembangannya menjadi keterancam bagi kelompok adat yang

ada di Kawasan perbatasan. Hal ini didasari oleh adanya ikatan budaya yang sama dan juga hubungan kekerabatan yang masih kental diantara dua masyarakat dua Negara. Kemajuan teknologi juga mengikis dan meminggirkan nilai-nilai adat yang ada

Berkaitan dengan fokus penelitian ini tahapan melanjutkan analisis tentang modernisasi dan bagaimana masyarakat merespon terhadap perubahan. Respon yang diperlihatkan oleh masyarakat adat dalam bentuk sikap dan perilaku mereka .

Pada tahap selanjutnya penelitian ini akan menganalisis pengaruh apa saja yang ditimbulkan oleh adanya modernisasi yang terjadi kawasan perbatasan. Pada tahap ini akan difokuskan pada bagaimana bentuk keterpengaruhan dua rah antara masyarakat dan bagaimana mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di perbatasan.

Pada tahapan ini ada dua hal yang akan dilakukan yaitu menganalisis pengaruh pembangunan fisik dan yang kedua adanya pengaruh terhadap masyarakat adat yang menyetuh pada perubahan sistem masyarakat dan aturan aturan formal.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Percepatan Pembangunan , modernisasi tata kelola di perbatasan Negara Indonesia Tiumor Leste mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan perubahan yang ada. Dengan mendasarkan pada Perpes 179 tahun 2014 maka pemerintah memberikan ruang bagi ketelibatan secara aktif masyarakat adat dalam proses pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden tersebut tersebut masyarakat adat juga mempunyai ruang untuk mempertahankan nilai-nilai adat mereka dengan menyesuaikan aturan formal yang ada dan tetap mengedepankan fleksibilitas adat mereka. Masukannya birokrasi modern di tengah tengah aturan adat yang asih kuat tidak serta merta di pahami sebagai keterancaman bagi tatanan nilai namun juga di jadikan sebagai bagian dari perkembangan yang menyertai penerapan aturan aturan adat dan perilaku adat ditengah tengah perubahan.

Meskipun pembangunan prasara dan sarana di kawasan perbatasan menimbulkan keterkejutan budaya sebagai perubahan yang *sim saalbim* dan tidak sedikit menimbulkan *gap* antara namun secara umum pembangunan yang cepat di perbatasan membawa perubahan yang baru bagi munculnya kejuan dan kemudahan bagi terbukannya isolasi masyarakat adat yang mulai tersentuh dengan kemajuan-kemajuan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Danny L. Jurgensen, 1989.. *Participant Observation, A Methodology for Human Studies*. Applied Social Research Methods Series Volume 15 (Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan , C.V. Nuansa Aulia.
- Eni Sugiarti, 2014, *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat DiPerbatasan Indonesia-Timor Leste: Kekerabatan Dan Mobilitas* dalam Laporan Penelitian Penelitian Strategi Nasional 2014 tahun ke -2
- _____, 2016, *Dinamika Sosial Ekonomi di Perbatasan Indonesia- Timor Leste: Pasar Tradisional Bersama di Perbatasan Timor Tengah Utara – Oesilo Oecusse Timor Leste dan Mobilitas Sosial Masyarakat* dalam Laporan Penelitian PUPT tahun 2016
- Fredman, John, *Empowerment The Politics of Alternative Development* lisher, , Blackwell pulisher Cambridge 1992
- Jim Iff dalam Zubaedi , wacanan Pembangunan alternative , Ragam dan Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ar-Ruzz, Media , Yogyakarta 2007
- .Haviland , William A. 1993, *Antropologi Jilid 3 edisi 4* Jakarta: Erlangga
- James P. Spradley, 1980, *Participant Observation* ,Florida: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Kaplan, Davis dan Manners , a. Robert. 2002. *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kim, Young Yun, 2001 *Becoming Intercultural : An Integrative Teori and Cross Cultural Adaptation USA* : Sage Publication
- Lusia Savitri Setyo Utami ,“ Teori-Teori Aaptasi antar Budaya “ dalam *Jurnal Komunikasi Universitas trauma Negara* Vol 7 no. 2 Juli 2015
- Mulyana, Deddy, 2003, *Komunikasi Antar Budaya panduan Berkomunikasi dengan Orang- Orang berbeda Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ritzer, George 1999, *Ilmu Sosiologi : Ilmu berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.. sztompka, Piort,, 2004, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta

Winkelman, Michael, 1994, "Culutral Shock and adaptastion ", *Journal of Conseling and Develepment*: JCD; Nov 1994: 73, 2 Pro Quest Pg. 121. Volume 73.

Wulansar, C, Dewi, 2009. *Sosisologi (Konsep dan Teori)* Bandung: Refika Aditama.

Kaplan, Davis dan Manners , a. Robert. 2002. *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

e. .

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
BARAYA

Lampiran Luaran : Prosising

UMS
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PASWFN

PROSIDING
PERSIDANGAN ANTARABANGSA SEJARAH,
WARISAN DAN FOLKLOR NUSANTARA

Sejarah, Warisan & Folklor

15 - 16 OGOS 2018

FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI & WARISAN
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
KOTA KINABALU SABAH, MALAYSIA

PENYUNTING
LOW KOK ON, MAT ZIN MAT KIB, GUSNI SAAT, HUMIN JUSILIN,
JACQUELINE PUGH, KITINGAN, NORHUDA SALLEH, JURRY FOO @ JURRY E. MICHAEL,
SALBIAH KINDOYOP, CHENG JIA MIN, AK'AB HASHIM, PG AB GHANI.

UMS ATMA

Persidangan Antarabangsa Sejarah, Warisan & Foklor Nusantara

Sejarah, Warisan & Foklor
15th- 16th Ogos 2018

Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan
Universiti Malaysia Sabah
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Dianjurkan oleh
Unit Penyelidikan Warisan Borneo
Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

**Persidangan Antarabangsa Sejarah, Warisan dan Foklor Nusantara
15th - 16th Ogos 2018, Universiti Malaysia Sabah**

Terbitan

Unit Penyelidikan Warisan Borneo, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta 2018

Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Unit Penyelidikan Warisan Borneo, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan dahulu.

Jenis Tulisan, Saiz Tulisan

Times New Roman, 12

Kulit Muka Hadapan

Unit Penyelidikan Warisan Borneo, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah

Penerbitan Ogos 2018

Dicetak: Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah

Penyunting

Low Kok On, Mat Zin Mat Kib, Gusni Saat, Humin Jusilin, Jacqueline Pugh-Kitingan, Norhuda Salleh, Jurry Foo @ Jurry F. Michael, Salbiah Kindoyop, Cheng Jia Min, Ak Ab Hashim Pg Ab Ghani.

Manut Ajung: Warisan Adat dan Kepercayaan Komuniti Bajau Azmin Pullong, Halina Sendera Mohd. Yakin	54-58
Folklor Lisan Sebagai Inspirasi Penciptaan Motif Batik Pesisir Bani Sudardi	59-63
Ritual Monginsamung Etnik Tombunuo di Sabah Cheng Jia Min, Low Kok On, Ismail Ibrahim	64-69
Pemilihan dan Penggunaan Dialek Melayu Sabah dalam Media Sosial oleh Pelajar Sino-Natif di Penampang Cheong Shaw Mei, Saidatul Normis Haji Mahali, Jane Wong Kon Ling	70-75
Pertubuhan The Sabah Society: Sebuah Pertubuhan Yang Peduli Eko Prayitno Joko, Baszley Bee Basrah Bee, Saat Awg Damit, Nordi Achie, Sitimurbayu Mohd Yusof, Mohamad Haziq Ikhsan Mohd Rudzainoor, Mhd Jasmi Nasier	76-81
Persaudaraan Sahabat Pena Sabah (PASPAS): Membenih Semangat Nasionalisme Melalui Kesusasteraan Eko Prayitno Joko, Ramli Dollah, Zaimi Othman, Saat Awg. Damit, Baszley Bee Basrah Bee, Mohammad Shaukhi Mohd Radzi, Mohd Haziq Ikhsan dan Jasmi Mhd Nasier	81-87
<u>Societal Dynamics in The State Borders of Indonesia-Timor Leste: The Cultural Adaptation Strategy of Indigenous People in The Border Between East Nusa Tenggara and Timor Leste on The Bureaucratic Modernization and The Development of Facilities and Infrastructures in The State Borde Eni Sugiarti</u>	88-93
Aplikasi Serbuk Tanah Liat dan Abu Kayu dalam Penghasilan Gerlis ke Atas Permukaan Seramk Farah Nabila Nordin, Humin Jusilin, Oscar Gordon Wong	94-99
Ambuyat dan Cacah: Sejarah, Invensi dan Inovasi Hajah Aimi Haji Karim	100-106

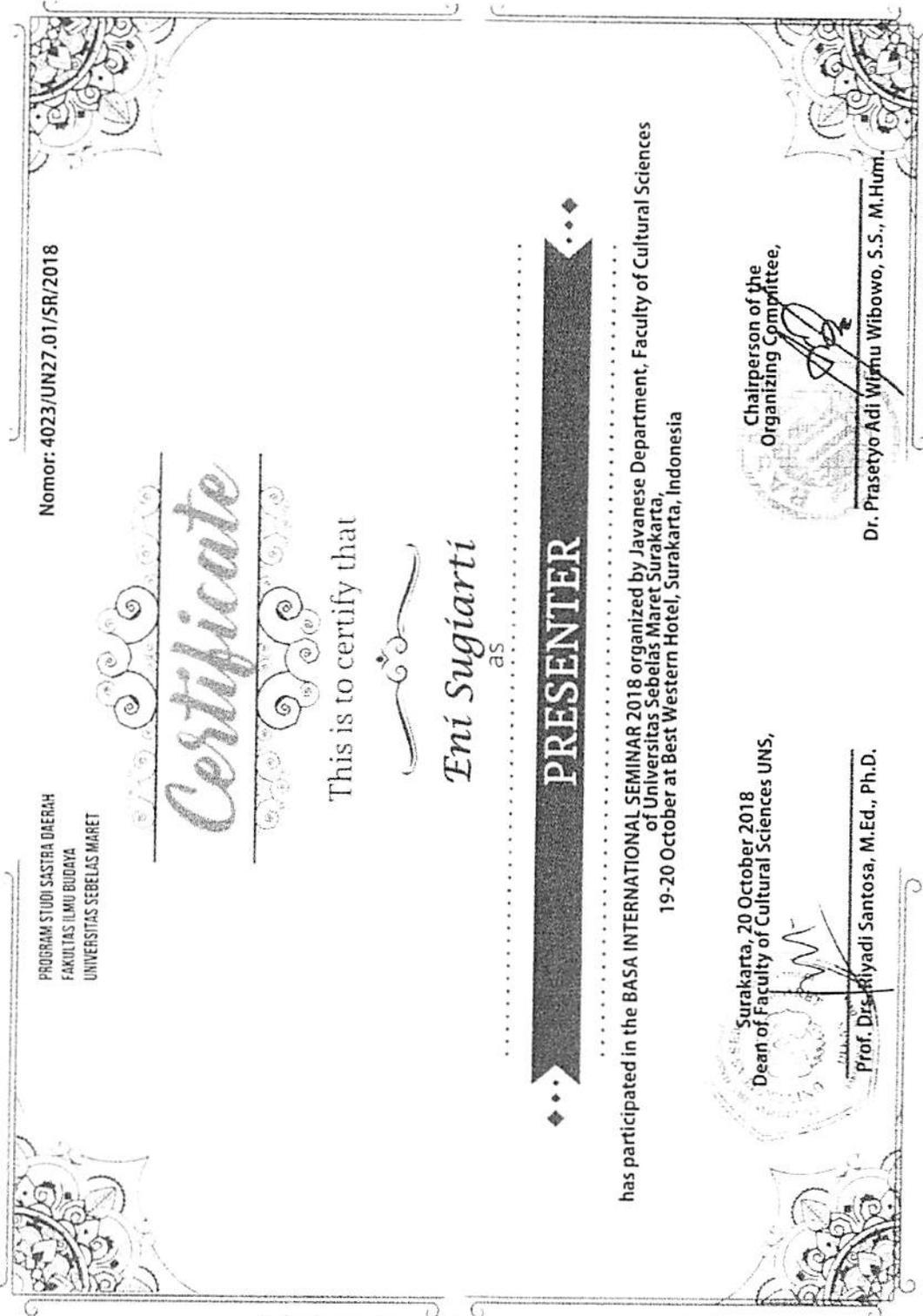
The Dynamics of Community in A State Border of Indonesia-Timor Leste: Cultural Adaptation Strategies of Indigenous Community in Nusa Tenggara Timur and Timor Leste Towards Modernization of Bureaucracy and Development of Facilities and Infrastructure in State Border

Eni Sugiarti

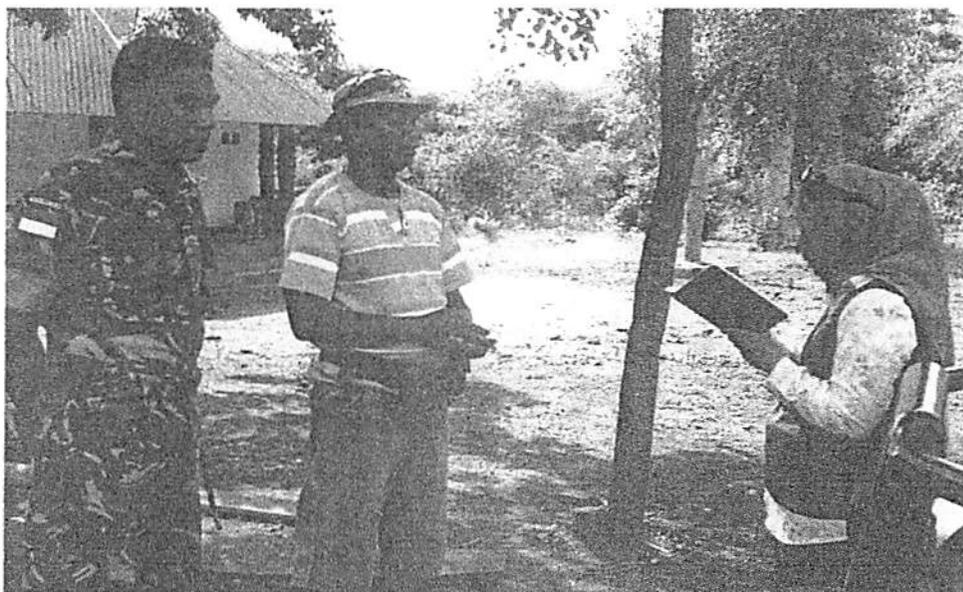
History Department Faculty of Humanities Universitas Airlangga
danu_damar@yahoo.co.id

Abstract – This research focused on a cultural adaptation of Indonesia-Timor Leste border communities to the modernization of bureaucracy and infrastructure. The direct observation method was used by applying in-depth interview technique using the cultural adaptation strategy theory by Kapler. The modernization of bureaucracy and the development of infrastructure and facilities in Indonesia border have an impact on how the way people respond and adapt to the new environment. Indigenous people combine both active and passive adaptations. They have contribution by inserting traditional values into border management. They change the administrative behavior in the state borders from traditional administrations into international standard bureaucracy and governance.

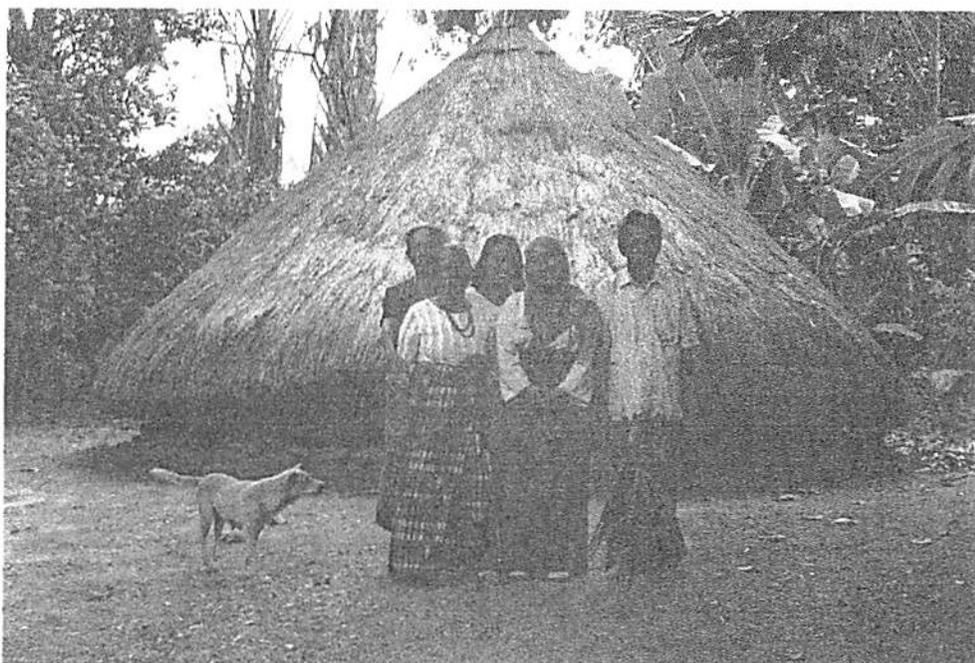
Key word: cultural adaptation, modernization, indigenous people, Indonesia-Timor Leste borders area.



Lampiran I : Kegiatan penelitian di Oecusse

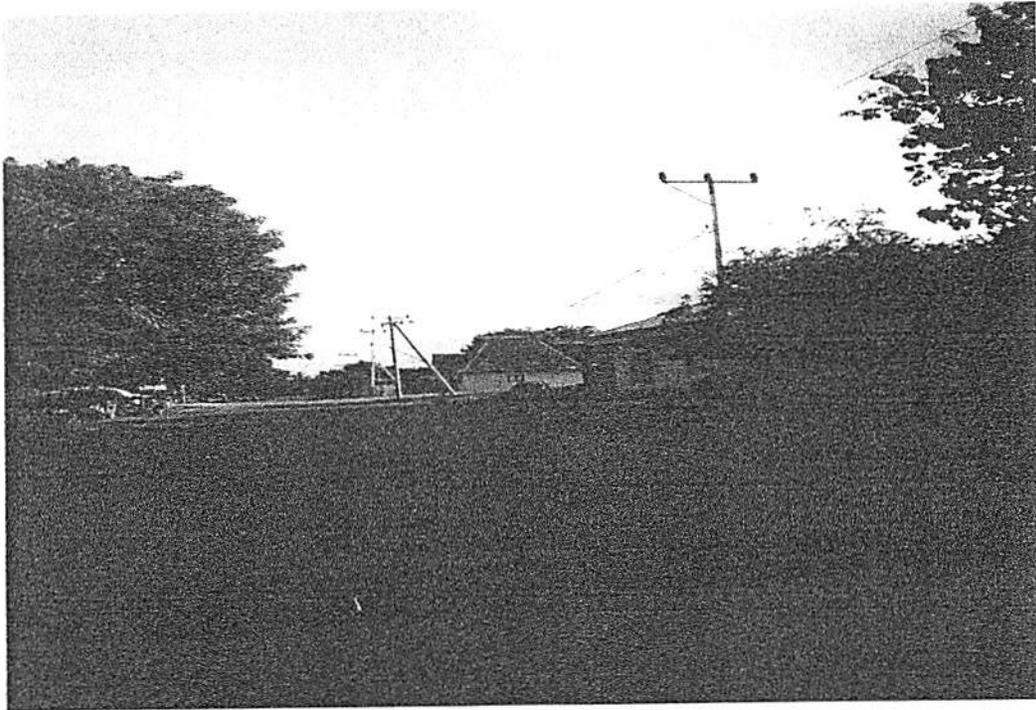


Lampiran 2 : Ketua adat di Insana



Sumber : Dokumen Penelitian 2018

Lampiran 6 : Listrikisasi di Daerah Motamasin



Sumber Dokumen Penelitian 2018

Lampiran 7 : Pertemuan Peneliti dengan Staf BNPP Kabupaten Belu



